

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Dokum en	1	1	13,043,750	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokum en	1	-	8,699,250	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	45,685,000	23,800,000	52.10	93.10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	23	23	13,800,000	13,800,000	100.0 0	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	23	23	31,885,000	10,000,000	31.36	90.12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	7	6	1,694,629,363	412,656,833	24.35	35.98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	35	19	53,923,188	21,314,766	39.53	99.40
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	63	63	212,212,786	211,394,900	99.61	99.61
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	53	53	542,669,639	43,453,960	8.01	20.62
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	8	6	70,178,750	24,999,150	35.62	35.62
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	Kali	12	9	126,575,000	28,475,000	22.50	38.23
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	kali	72	26	689,070,000	83,019,057	12.05	23.14
		Jumlah aktifitas rapat- rapat koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahlainnya yang disediakan	kali	24	9				
		Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi antar SKPD yang disediakan	kali	10	10				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Jenis	78	1	10,125,774,666	1,317,841,680	13.01	23.01
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Unit	5	-	2,379,476,000	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang diadakan	Jenis	32	-	1,299,274,823	-	-	21.89

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	14	-	359,546,088	-	-	21.26
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Unit	2	-	2,516,028,585	683,082,000	27.15	41.98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	-	2,792,514,260	610,779,680	21.87	30.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jenis	3	1	778,934,910	23,980,000	3.08	9.62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	4	4	6,703,430,168	2,786,028,806	41.56	42.41
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	kg	160	107	5,600,000	385,000	6.88	38.43
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	6	4,451,611,568	1,936,576,187	43.50	43.54
		Jumlah penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah	bulan	12	6				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	17	22	222,865,000	32,525,000	14.59	21.91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	12	6	2,023,353,600	816,542,619	40.36	42.20
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	12	6				
		Jumlah (rumah/gedung) asrama mahasiswa yang disewa	unit/tahun	7	3				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	7	4	929,009,191	46,061,100	4.96	7.04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	20	4	295,084,627	17,389,800	5.89	6.65
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	43	22	302,661,500	24,771,300	8.18	8.94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	11	3	104,279,600	3,900,000	3.74	17.91

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	125,635,404	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jenis	2	-	53,746,250	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jenis	1	-	47,601,810	-	-	-
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jenis	4	4	866,517,620	390,856,536	45.11	46.17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam setahun	Dokumen	12	8	179,694,000	100,142,916	55.73	56.63
	Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan	Stell	10	10	31,863,620	31,863,620	100.00	100.00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam setahun	Kali	4	2	54,960,000	8,850,000	16.10	29.96
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam setahun	Dokumen	2	2	600,000,000	250,000,000	41.67	41.67
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah jenis fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jenis	3	3	966,514,400	382,736,200	39.60	40.38
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	bulan	12	6	493,212,000	187,500,000	38.02	38.02
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	bulan	12	6	386,904,000	161,112,200	41.64	41.64
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	bulan	12	6	86,398,400	34,124,000	39.50	48.23
	Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi	%	100	42.86	296,589,150	86,809,700	29.27	41.15
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun	Dokumen	1	-	130,853,450	37,335,000	28.53	45.80

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
		Jumlah dokumen Analisis Jabatan yang disusun	Dokumen	1	-				
		Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	Dokumen	1	1				
		Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi	SKPD	1	1				
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah peserta sosialisasi SOP atau Pelayanan Publik	orang	-	-	60,820,000	17,614,000	28.96	39.21
		Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	Laporan /SKPD	7	-				
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen LKIP, RKT, PK Kabupaten/Kotawaringin Barat yang tersusun	Dokumen	3	3	104,915,700	31,860,700	30.37	36.48
		Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun	Dokumen	1	-				
		Jumlah peserta Asistensi Evaluasi SAKIP	orang	100	-				
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan layanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	%	100	34.46	1,043,707,950	250,965,058	24.05	33.13
	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah jasa keprotokol yang dilaksanakan	Kali	5	3	279,210,000	65,964,708	23.63	41.36
		Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/wakil kepala daerah	Kali	40	23				
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat yang difasilitasi	Kali	24	6	493,750,000	99,557,500	20.16	24.97
		Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	Kali	10	1				
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah	Kali	17	20	270,747,950	85,442,850	31.56	39.50
		Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk buletin, album, DVD, spanduk dan sejenisnya	Jenis	3	1				

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
		Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati yang dikumpulkan	Buku	50	-				
		Jumlah dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk klipng	Eks	365	180				
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD	%	95.00	-	8,277,956,400	948,093,999	11.45	12.11
		Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	%	90.00	-				
		Persentase Produk Hukum Daerah yang mendapatkan fasilitasi/ evaluasi Pemerintah Provinsi	%	80.00	78.79%				
		Persentase Penawaran Kerjasama Pemerintah Daerah yang disepakati	%	92.00	100.00%				
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah jenis layanan administrasi tata pemerintahan yang disediakan	Jenis	3	3	438,028,300	70,658,099	16.13	21.17
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah bahan kebijakan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana kelurahan yang disusun	Dokumen	3	2	21,784,000	-	-	2.50
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan	Dokumen	3	-				
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah data kesiapan pemekaran kecamatan	Dokumen	3	-	357,216,950	47,616,549	13.33	17.42
		Jumlah Ranperda pemekaran kecamatan dan Kelurahan	Ranperbup	2	-				
		Jumlah laporan hasil monev penataan dan pengembangan wilayah	Dokumen	3	-				
		Jumlah Peta Batas yang dibuat	Peta	7	1				
		Jumlah Ranperbup Pemekaran Desa	Ranperbup	1	-				
		Jumlah Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dihasilkan	Ranperbup	1	1				
		Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	Bulan	12	3				

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	Dokumen	1	1	59,027,350	23,041,550	39.04	50.75
		Jumlah laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	1				
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan bahan kebijakan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	Dokumen	9	4	7,473,415,800	739,751,900	9.90	10.00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	orang	160	-	3,341,007,200	690,983,400	20.68	20.68
		Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	Desa	6	5				
		Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	orang	300	300				
		Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	Kegiatan	1	-				
		Jumlah kegiatan LPTQ/MTQ yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-				
		Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	orang	24	24				
		Jumlah tokoh agama non muslim yang diberikan insentif	orang	115	115				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	Dokumen	1	-	50,903,800	25,832,000	50.75	58.22
		Jumlah bahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Dokumen	2	1				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/hibah	Dokumen	1	-	4,081,504,800	22,936,500	0.56	0.66
		Jumlah laporan movev lembaga kemasyarakatan yang disusun	Dokumen	-	-				
		Jumlah Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan hibah	Lemba ga	190	-				

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah jenis layanan fasilitasi dan koordinasi hukum yang disediakan	Jenis	3	3	345,140,450	134,304,000	38.91	45.31
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup yang mendapatkan fasilitasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Daerah	Perda/ Perbup	30	26	81,533,900	43,674,600	53.57	74.28
	Fasilitasi bantuan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja	Kali	3	-	219,907,650	71,567,000	32.54	33.31
		Jumlah perkara/ permasalahan litigasi/ non litigasi yang ditangani	Putusan	4	1				
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	Buku	25	15	43,698,900	19,062,400	43.62	51.65
		Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	Perda/ Perbup	30	21				
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	-				
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga yang diajukan dan diterima	Dokumen	12	6	21,371,850	3,380,000	15.82	28.45
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga yang diajukan dan diterima	Dokumen	10	6	21,371,850	3,380,000	15.82	28.45
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase laporan monev dan pengendalian bidang Perekomian yang dihasilkan	%		100.00%	669,431,950	222,280,600	33.20	48.07
		Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target	%		72.26%				
		Persentase kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)	%		11.11%				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan evaluasi kebijakan perekonomian yang disusun	Dokumen	6	6	30,439,600	13,002,000	42.71	64.48

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan pengendalian dan pemantauan sarana perekonomian yang ditindaklanjuti	Dokum en	6	6	30,439,600	13,002,000	42.71	64.48
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah jenis layanan administrasi pembangunan yang disediakan	Jenis	3	3	164,682,950	49,849,000	30.27	38.74
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RKT, Perjanjian Kinerja, Renja, Rencana Aksi Kinerja, Reviu Renstra, Reviu/ Perubahan IKU) yang disusun	Dokum en	7	3	60,754,050	21,009,700	34.58	44.67
		Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah yang disusun	Dokum en	1	1				
		Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah yang disusun	Dokum en	1	1				
		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun	Dokum en	9	5				
		Jumlah laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan progres rencana aksi Perangkat Daerah yang disusun	Dokum en	6	4				
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi realisasi anggaran program dan kegiatan yang disusun	Dokum en	12	6	43,369,900	14,339,450	33.06	39.90
		Jumlah laporan /Data Kegiatan Pembangunan yg disusun	Dokum en	1	1				
		Jumlah laporan pemantauan pengendalian program pembangunan yang disusun	Dokum en	-	-				
		Jumlah laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan progres rencana aksi Perangkat Daerah yang disusun	Dokum en	4	2				

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
		Jumlah laporan SDDKN yang disusun	Dokum en	2	1				
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun	Lapora n	14	7	60,559,000	14,499,850	23.94	31.95
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil program/ kegiatan pembangunan yang disusun	Lapora n	1	-				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah jenis layanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang disediakan	Jenis	3	3	353,583,800	118,168,500	33.42	51.72
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bukti dukung variabel penilaian kematangan UKPBJ yang terverifikasi	Dokum en	9	1	237,371,200	82,185,000	34.62	54.79
		Jumlah laporan Tepra (Progres PBJ Kab. Ktw. Barat) yang disusun	Lapora n	12	6				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah aparatur kelurahan yang diberikan asisten penyusunan RUP	orang	-	-	42,268,800	13,984,700	33.09	46.79
		Jumlah laporan data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE	Lapora n	36	9				
		Jumlah SKPD yang dievaluasi Rencana Umum Pengadaannya	SKPD	38	38				
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kasus/ permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi) yang terselesaikan	kasus	4	3	73,943,800	21,998,800	29.75	44.69
		Jumlah laporan evaluasi pengadaan barang/ jasa Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun	Lapora n	12	6				
		Jumlah laporan monev PBJ Desa yang disusun	Lapora n	3	-				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah jenis pemantauan kebijakan terkait Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Jenis	2	2	120,725,600	41,261,100	34.18	45.99
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dihasilkan	Dokumen	6	6	62,305,800	21,462,100	34.45	45.71
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan data potensi sumber daya alam yang dihasilkan	Dokumen	6	6	58,419,800	19,799,000	33.89	46.29
	TOTAL					44,565,198,666	13,625,036,087	30.57	36.30

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Sekretariat Daerah telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 36,30%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.31. Unsur Sekretariat DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp25,452,991,384.00,00 dan terealisasi sebesar Rp.12,164,717,183,00 atau 47,79%, sedangkan realisasi fisik sebesar 48,19%. Adapun realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31 Realisasi Pelaksanaan Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		REAL FISIK (%)
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	50				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	90	50	5.002.500	41	45	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	3	0	-	-	12	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		REAL FISIK (%)
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1		-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	0		-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1		1.292.500	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1		-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dok	3	3		3.710.000	100	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	90	85		1.258.458.241	47	47
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	dok	22	22		1.240.081.979	47	47
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	lap	15	7		17.626.262	32	32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	orang	1	1		750.000	19	19
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Disiplin Aparatur	%	90	0		-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	stell	56	0		-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	Ok	5	0		-	-	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	32,5		121.982.159	36	36
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	10	5		11.389.500	37	37
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	38	38		63.862.821	51	51
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	4	0		-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan	unit	11	0		-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	11	0		-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	buku	30	0		-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		REAL FISIK (%)
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu yang disediakan	kali	60	30		21.680.000	31	31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan	Ok	24	15		25.049.838	55	55
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	90	33,3		9.427.000	11	11
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	jenis	4	0		-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang diadakan	jenis	6	6		-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	unit	1	0		9.427.000	100	100
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	90	50		526.346.833	40	40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket/Surat yang terkirim	paket	20	0		-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	6		125.404.407	44	44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan kantor	bulan	12	6		400.942.426	39	39
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	%	90	60		29.084.563	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan Perizinan	unit	19	2		7.542.694	7	13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan Perizinan	unit	3	3		14.311.869	7	7
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	10	3		7.230.000	8	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1		35.315.000	33	33
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	%	90	33,6		8.371.685.780	57	57
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan DPRD DPRD satu tahun	orang	30	30		8.286.228.180	59	59

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		REAL FISIK (%)
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan Atribut DPRD yang diadakan	stell	90	0		-	-	-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Chek Up DPRD	orang	30	4		85.457.600	13	13
9.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	90	52		431.098.741	54	54
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Tenaga yang Memfasilitasi Fraksi	bulan	12	6		84.468.272	41	41
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah aktifitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	ok	93	60		164.865.569	68	68
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	6		181.764.900	52	52
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			%	98	62,5				
10.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Cakupan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	%	98	62,5		276.891.048	38	38
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan daerah	kali	43	20		49.879.300	34	34
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda yang difasilitasi	kali	44	20		70.169.636	33	33
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan	dok	1	1		138.930.000	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan penjelasan keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi	kali	2	1		17.912.112	8	8
11.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase kegiatan pembahasan kebijakan Anggaran yang difasilitasi	%	98	0		-	-	-
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi	kali	12	0		-	-	-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi	kali	12	0		-	-	-
	Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD yang difasilitasi	kali	17	0		-	-	-
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang difasilitasi	kali	17	0		-	-	-
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi	kali	17	0		-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		REAL FISIK (%)
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
13.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	98	75		56.375.000	55	57
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat kerja bersama Mitra yang difasilitasi	kali	29	16		37.400.000	45	47
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi	kali	12	12		18.975.000	95	95
14.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	%	98	57,5		940.908.249	28	28
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	ok	30	30		307.018.628	46	46
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Penyediaan Publikasi dan dokumentasi dewan yang difasilitasi	bulan	12	6		-	-	-
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli	bulan	12	6		-	-	-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja yang disusun	kali	12	4		633.889.621	30	30
15.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	%	98	56,6		137.457.069	29	46
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan kerja dalam daerah	ok	60	30		45.500.000	36	36
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	kali	3	1		-	-	71
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan reses yang diadakan dan terfasilitasi	kali	3	2		91.957.069	28	49
	TOTAL						12.164.717.183	48	48
		Rata-Rata Capaian Kinerja Program	%	100	56,25				

Rata-rata capaian kinerja program pada unsur Sekretariat DPRD adalah sebesar 56,25 % atau masuk kriteria **Rendah**.

2.32. Kewilayahan

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Kewilayahan diampu oleh 6 Kecamatan yakni Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng, termasuk juga pengelolaan Dana Kelurahan di dalamnya. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang kewilayahan per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.32 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					3=4+8+1 2+16	4	21=(20/3)*100	22	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran				9.434.764.080	5.713.851.088	275	176
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	6	8.251.538.618	5.044.522.277	61	61
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Bulan	12	6	8.250.269.868	5.044.522.277	61,14	61
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Orang	4		1.268.750			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	%	100%		10.920.000	10.240.000	93,77	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Stell	-		-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan yang diikuti	Orang	4	1	10.920.000	10.240.000	93,77	94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Bulan	12	6	149.989.916	111.343.606		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	24		17.491.958	17.491.958		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%	90%		70.539.920	70.539.920		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis			1.680.000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	100	100		33.390.038	5.739.950		
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	%	90%		26.888.000	17.571.778	65,35	65,35
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Buah	200		4.999.995	4.650.000	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					$3=4+8+1$ $2+16$	4	$21=(20/3)*100$	22	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang diadakan	%	90%		4.999.995	4.650.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	90%		898.906.341	438.316.805	98,29	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	6		166.608.830	83.474.869	50,10	50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan dan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Unit	18		732.297.511	352.841.936	48,18	48
	Benda pos						2.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	45		118.409.210	26.409.200	22,30	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajak yang tersedia	Unit	18		32.213.210	5.620.000	17,45	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	18		13.000.000	1.144.200	8,80	8,80
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bulan	12	6	73.196.000	19.645.000	26,84	26,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung yang tersedia				-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					66.526.800	24.867.200	37,38	37,38
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Des/Kel	20	7	28.810.000	8.790.000		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Des/Kel	20	10	28.810.000	8.790.000	30,51	31
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Des/Kel	20	6	37.716.800	16.077.200		

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					$3=4+8+1$ $2+16$	4	$21=(20/3)*100$	22	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Des/Kel	20	10	35.816.900	16.077.200	44,89	45
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Des/Kel	20	7	1.899.900	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					88.239.350	53.502.000	136,68	136,68
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi Desa yang di Fasilitasi	Des/Kel	20	8	88.239.350	53.502.000	393,17	393,17
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Tata Pemerintahan yang di fasilitasi	Des/Kel	20	7	34.923.950	15.556.000	44,54	45
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah BPD Pengelolaan Keuangan Desa yang di Fasilitasi	Des/Kel	20	12	24.707.850	22.766.000	92,14	92
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	Jumlah BPD yang di fasilitasi	Des/Kel	20	7	2.523.950	2.420.000	95,88	95,88
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Musdes yang di fasilitasi	Des/Kel	20	7	2.523.950	2.200.000	87,16	87,16
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Penyelenggaraan Ketertiban	Des/Kel	20	7	4.756.900	1.100.000	23,12	23,12
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang memerlukan pendampingan	Des/Kel	20	15	18.802.750	9.460.000	50,31	50,31
	DANA KELURAHAN						e		
	KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG					439.242.842			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					352.495.842	70.238.180	42,23	42,23
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					352.495.842			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	113		188.266.802	889.140		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	200		164.229.040	69.349.040	42	42
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					86.747.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	%	90%		86.747.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	RT	5		86.747.000		-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					3=4+8+1 2+16	4	21=(20/3)*100	22	
	KELURAHAN MENDAWAI					550.349.360			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					443.320.360	163.240.720	155	283
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					443.320.360	163.240.720	155	155
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	30		234.020.360	107.740.720	128	128
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	2.000		209.300.000	55.500.000	27	27
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					107.029.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	Buah	37		107.029.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	RT	30		107.029.000	7.425.000	8	8
	KELURAHAN MADUREJO					545.116.350			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					424.075.350	73.320.000	38	38
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					424.075.350			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	18		241.400.000	3.520.000		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	12		182.675.350	69.800.000	38	38
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					121.041.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	Unit	28		121.041.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	%	60		121.041.000	2.700.000	2	2
	KELURAHAN SIDOREJO					496.682.916			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					391.844.916	121.836.000	32	32
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					391.844.916			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	67		197.448.116	59.786.000		

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					3=4+8+1 2+16	4	21=(20/3)*100	22	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	12		194.396.800	62.050.000	32	32
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					104.838.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	Buah	35		104.838.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	RT	30		104.838.000		-	-
	KELURAHAN RAJA					441.613.210			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					348.202.210	2.218.492.440	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					348.202.210			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	100	30	158.245.410	2.135.292.440		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	100		189.956.800	83.200.000		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					93.411.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	Unit	18		93.411.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	Bulan	12		93.411.000		-	-
	KELURAHAN RAJA SEBERANG					517.541.890			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					429.080.890	55.100.000	49	49
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					429.080.890			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	30		281.890.890			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	1.000		147.190.000	55.100.000	49	49
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					88.461.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penangan Penyelenggaraan Covid-19	Unit	30		88.461.000			

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1					3=4+8+1 2+16	4	21=(20/3)*100	22	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	RT	7		88.461.000	16.836.200	19	19
	KELURAHAN BARU					465.386.000			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					358.700.000	161.500.000	46	46
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					358.700.000	161.500.000	46	46
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang tersedia	Unit	50	10	-			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	Buah	38	15	358.700.000	161.500.000	46	46
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.686.000		-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penanganan Penyelenggaraan Covid-19	Posko	36	15	106.686.000			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencegahan Penanganan dan Pembinaan Covid-19	Bulan	12		106.686.000	43.535.360	41	41
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100					

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Arut Selatan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 41%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

Tabel 2.33 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	25	50	2.918.932.476	1.578.101.931	54,06	54,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	100	6.419.800	5.719.800	89,10	89,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun tepat waktu	dok	1	1	700.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dok	1	1	0,00	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dok	1	1	0,00	-		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dok	1	1	1.159.900	1.159.900	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	dok	1	1	4.559.900	4.559.900	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	%	100	90	2.584.445.412	1.429.379.997	55,31	55,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	7	2.575.027.562	1.425.002.147	55,34	55,31
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya buku cek , materei dan benda pos lainnya	jenis	1	1	3.000.000	-	-	33,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	4.377.850	4.377.850	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	Laporan	14	6	2.040.000	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	0	0	0,00	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas harian yang diadakan	-	-	-	0,00	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	-	-	-	0,00	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	37	31	67.861.960	7.397.980	10,90	62,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai	jenis	5	5	822.932	748.120	90,91	90,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	jenis	31	25	21.239.028	6.649.860	31,31	54,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan anggaran perjalanan dinas	OK	258	180	45.800.000	-	-	65,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang/jasa yang diadakan				29.744.748	29.744.748	100,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	unit	4	4	29.744.748	29.744.748	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	bulan	12	6	212.312.476	89.171.406	42,00	45,66

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa listrik, air dan internet	bulan	12	5	34.829.804	15.417.800	44,27	66,57
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan pelayanan umum	bulan	12	6	177.482.672	73.753.606	41,56	41,56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah di kantor kecamatan Arut Utara	Unit	16	14	18.148.080	16.688.000	91,95	99,56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan biaya pemeliharannya	unit	4	1	15.998.080	15.998.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan biaya perizinannya	unit	7	0	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jasa pemeliharannya	unit	4	2	2.150.000	690.000	32,09	96,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	0	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	%	85	90	71245200	22.575.208	31,69	40,29
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang diterbitkan sesuai SOP pelayanan	dok	140	292	71.245.200	22.575.208	31,69	31,69
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan dan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan Non Usaha yang dilayani tepat waktu	dok	100	48	68.935.200	22.575.208	32,75	41,64
		Jumlah Tenaga Kontrak PATEN yang disediakan honorariumnya	OK	2	2				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dokumen Nonperizinan yang dilayani tepat waktu	dok	40	244	2.310.000	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang dibina/difasilitasi	%	100	90	10.500.000	5.500.000	52,38	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang dibina/difasilitasi	Desa	10	10	10.500.000	5.500.000	52,38	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan musyawarah desa	Desa	10	10	10.500.000	5.500.000	52,38	100,00
		Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan dana DD dan ADD	Desa	10	10				
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan Lomba Desa	Desa	2	0				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina/difasilitasi	%	100	80	34.400.000	-	-	43,60
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/ kelurahan yang menyusun laporan	Desa	11	10	34.400.000	-	-	43,60
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa dan kelurahan yang anggota linmas dan poskamlingnya aktif	Desa	11	10	2.400.000	-	-	-
		Jumlah Desa yang menyampaikan laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Desa	11	4				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina/difasilitasi Lembaga kemasyarakannya	Desa	10	10	-	-		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam tata kelola pemerintahannya	Desa	10	10	32.000.000	-	-	46,88
		Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	Desa	2	3				
		Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa lahan	Desa	2	1				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	%	85	36	652.328.430	-	-	1,24
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan	kelurahan	1	1	652.328.430	-	-	1,24
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan di kelurahan	unit	3	-	482.538.480	-	-	1,24
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	11	5	169.789.950	21.450.000	12,63	12,63
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase RT yang dilakukan monitoring/ educating kegiatan PPKM	%	100	62	93.203.000	-	-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah RT yang dilakukan monitoring/ educating	RT	7	7	93.203.000	-	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan PPKM	Laporan	12	6	91.003.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	2	-	2.200.000	-	-	-
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%		68	3.780.609.106	1.606.177.139	42,48	44,41

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Arut Utara telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 44%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

Tabel 2.34 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							Rp	%	
36									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	50	5.203.660.651	2.736.887.125	52,60	56,59
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	%	100	100%	227.500	-	-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	1	1	227.500			100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	%	100	45	4.581.584.460	2.502.663.181	54,62	57,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dalam satu tahun	dokumen	28	12	4.578.834.410	2.500.313.181	54,61	57,76
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	dokumen	600	232	1.032.500	1.000.000	96,85	96,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	1	1.490.050	1.350.000	90,60	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	laporan	1		227.500			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100%	9.375.650	9.373.640	99,98	100,00

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							Rp	%	
36									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	-	-	-				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	9.375.650	9.373.640	99,98	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	50	454.201.741	178.332.254	39,26	49,48
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	6	81.849.061	35.556.403	43,44	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	6	372.352.680	142.775.851	38,34	49,36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	%	100	60	104.430.800	40.968.050	39,23	51,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	jenis	14	6	5.953.650	-		16,80
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	jenis	36	25	34.083.300	8.473.050	24,86	50,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	jenis	2	2	22.509.450	6.227.000	27,66	41,88
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	orang	69	37	41.884.400	26.268.000	62,72	63,91
		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	100	20				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	12	53.840.500	5.550.000	10,31	16,81
		Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit	5	1	27.651.000	5.550.000	20,07	21,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	17	-	9.709.500			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	37	6	16.480.000			18,20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	%	90		74.745.000	27.337.000	36,57	44,36

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							Rp	%	
36									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan	dokumen	2100	886	74.745.000	27.337.000	36,57	44,36
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah ijin yang diterbitkan	dokumen	1000	193	1.870.000			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	dokumen	1100	693	72.875.000	27.337.000	37,51	45,50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	%	100	50	23.585.000	19.890.000	84,33	85,98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah musrenbang tingkat kecamatan yang diadakan	kegiatan	1	1	20.277.500	19.890.000	98,09	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbang tingkat kecamatan yang diadakan	kegiatan	1	1	20.277.500	19.890.000	98,09	100,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah musrenbang tingkat kelurahan yang diadakan	kegiatan	3	-	3.307.500	-	-	0,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musrenbang tingkat kelurahan yang diadakan	kegiatan	3	-	3.307.500			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina	%	100	100%	198.760.000	33.088.000	16,65	19,65
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	desa	15	15	198.760.000	33.088.000	16,65	19,65
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	desa	15	15	27.985.000	10.098.000	36,08	38,05
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan	desa	15	15	33.710.000			
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan lomba tingkat desa/kelurahan	desa/ kelurahan	18		-			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	desa/ kelurahan	5					
		Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa lahan	desa/ kelurahan	9	2	20.990.000	1.650.000	7,86	8,93
		jumlah desa/kelurahan yang melaporkan data kependudukan	desa/ kelurahan	18	18				

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							Rp	%	
36									
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang dibina kepala desa dan perangkatnya	desa	15	15	4.695.000			0,00
		Jumlah desa/kel yang difasilitasi pemilu							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan yang aktif kegiatan siskamling	desa/kelurahan	8	6	18.620.000	4.130.000	22,18	27,01
		jumlah karhutla yang tertangani	titik	50	13				
		Jumlah anggota satlinmas, satlak dan satgas bencana yang dibina	orang	10	10				
		jumlah penertiban PKL	kegiatan	10	2				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah fasilitasi bidang keagamaan	kegiatan	3	2	92.760.000	17.210.000	18,55	23,19
		Jumlah fasilitasi bidang kesehatan	kegiatan	1	1				
		Jumlah fasilitasi bidang sosial dan masyarakat	kegiatan	2	3				
		Jumlah fasilitasi bidang wawasan kebangsaan	kegiatan	1					
		Jumlah kader PKK yang difasilitasi	kegiatan	120	120				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat	%	100		1.263.817.255	50.000.000	3,96	10,84
	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat	%	77		1.263.817.255	50.000.000	3,96	10,84
		Persentase ketercukupan sarana prasarana di kelurahan	%	75					
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Jaringan Air Minum Yang Dibangun/Dipelihara	titik	1		44.999.995			
		Panjang Drainase dan Selokan Yang Dibangun/Dipelihara	meter	3202		296.108.480			
		Jumlah pompa kebakaran portabel Yang Diadakan/Dipelihara	unit	2		500.000			
		Jumlah penerangan Lingkungan pemukiman Yang Dibangun/Dipelihara	buah	50		64.999.990			
		jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya Yang Dibangun/Diadakan/Dipelihara	jenis	5		196.575.755			
		panjang jalan pemukiman Yang Dibangun/Dipelihara	meter	50		161.250.000			

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
							Rp	%	
36									
		jumlah sarana prasarana kesehatan lainnya yang Dibangun/diadakan/Dipelihara	jenis	2		9.098.100			
		jumlah wahana permainan anak usia dini Yang Dibangun/Dipelihara	buah	2		9.900.000			
		jumlah sarana pendidikan dan kebudayaan lainnya Yang Dibangun/Diadakan/Dipelihara	jenis	4		73.349.991			3,41
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pelatihan kader kesehatan masyarakat/ jumlah kader yang dilatih	kegiatan	1		21.527.390			
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	kegiatan	5	5	87.000.000			50,00
		Jumlah penyelenggaraan pelatihan usaha	kegiatan	1		52.770.994			
		Jumlah pelatihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	kegiatan	2		44.652.560			
		jumlah kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya	kegiatan	4	3	181.890.000	50.000.000	18,55	50,00
		Jumlah pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana	kegiatan	1		19.194.000			
	Program Koordinasi Kentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	%	100					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	10	3	241.455.114	-	-	14,06
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	kegiatan	9	3	236.980.114			14,32
	Harminisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	kegiatan	1		4.475.000			
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%			7.039.091.906	2.867.202.125	40,73	45,68

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Kumai telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 45.68%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

Tabel 2.35 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	50	5.278.004.199	1.893.467.101	40,95	46,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	60	7.140.000	1.440.000	20,17	50,98
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	4	3.060.000	1.200.000	39,22	71,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	aporan	12	10	4.080.000	240.000	5,88	35,29
	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	100	50	3.435.181.222	1.883.037.101	54,82	60,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	6	3.415.191.222	1.879.877.101	55,04	59,44
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Bulan	12	6	18.550.000	1.720.000	9,27	14,56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	1	1.440.000	1.440.000	100	100,00
	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	%	100	0	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS Golongan I dan II yang diadakan	Stell	6	0	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Bimtek	OK	5	0	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	60	155.123.960	27.694.500	17,85	40,09

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	Jenis	20	12	12.798.159	-	-	62,51
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	50	45	32.421.301	10.615.500	32,74	55,88
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	15.004.500	5.871.000	39,13	65,79
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	OK	803	200	94.900.000	11.208.000	11,81	27,62
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OK	266	130				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0,20	1.010.175.141	10.430.000	4,24	4,24
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	Unit	2	2	10.996.238	10.430.000	94,85	94,85
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di bangun	1	1	0	999.178.903	-	3,24	3,24
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa administrasi perkantoran	%	100	50	575.413.376	222.603.351	38,69	49,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	Bulan	12	6	65.115.066	20.456.687	31,42	46,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor (Bulan)	Bulan	12	6	510.298.310	202.146.664	39,61	49,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	50	94.970.500	-	-	3,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Unit	14	14	68.515.000	10.436.000	15,23	17,51
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		6	6	26.455.500	-	-	11,34
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	0	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	9.770.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis Urusan yang dilaksanakan	Jenis	2	2	9.770.000	-	-	34,39
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan	Dokumen	100	75	8.810.000	-	-	32,69
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan	Dokumen	100	183	960.000	-	-	50,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang di fasilitasi	%	100	80	23.745.000	17.985.000	75,74	76,80
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di laksanakan	Kegiatan	1	1	18.250.000	17.985.000	98,55	99,92
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	18.250.000	17.985.000	98,55	99,92
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	5.495.000	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	5.495.000	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang di fasilitasi	%	100	75	73.160.000	6.968.000	9,52	23,64
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	Jenis	8	8	73.160.000	6.968.000	9,52	14,12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilu		0	0	1.440.000	240.000	16,67	55,56
		Jumlah Desa/Kelurahan yang melaporkan data kependudukan	Desa/Kel	17	17				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di bina dan di fasilitasi	Desa	15	15	14.880.000	1.620.000	10,89	16,80
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	Jumlah Desa yang di bina dan di fasilitasi bidang Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	15	10	1.920.000	736.000	38,33	52,08
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan di fasilitasi Tugas dan Fungsi BPD	Desa	15	15	1.920.000	432.000	22,50	37,50
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa/Kelurahan yang Aktif siskamlingnya	Desa	15	15	9.840.000	-	-	20,33

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
		Jumlah Karhutla yang tertangani	Titik Api	0	0				
		Jumlah anggota satlinmas, satlak dan satgas bencana yang dibina	Orang	17	0				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi Kader PKK Kec/Kel, Fasilitasi bidang keagamaan, fasilitasi bidang wawasan kebangsaan, fasilitasi bidang kesehatan, dan fasilitasi bidang sosial dan kemasyarakatan.	Desa/Kel	17	12	24.200.000	3.940.000	16,28	21,69
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	Desa	2	2	4.080.000	-	-	-
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi	Desa	15	15	14.880.000	-	-	13,44
	KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR	Indeks Pembangunan Kelurahan	Nilai	70		375.674.600	68.538.600	18,24	31,55
	PROGRAM KOORDINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKM Skala Mikro di Kelurahan	%	100		96.552.000			
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKM Skala Mikro di Kelurahan	Bulan	8	2	96.552.000			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis Barang dan jasa penunjang pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Kelurahan yang disediakan	Jenis	17		96.552.000			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	%	100	50	279.122.600	68.538.600	24,56	29,93
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	1	279.122.600	68.538.600	24,56	29,93
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan	Unit	3	0	116.368.160	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan (Kegiatan)	Kegiatan	2	2	162.754.440	56.994.400	35,02	44,23
		Jumlah Insentif Ketua RT yang disediakan (OB)	OB	120	60				
		Jumlah Honor Petugas Pengelola Sampah (OB)	OB	36	18				

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
		Jumlah Honor Kader Posyandu yang disediakan (OB)	OB	180	90				
	KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU	Indeks Pembangunan Kelurahan	Nilai	70		363.768.000	-	-	40,53
	PROGRAM KOORDINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKM Skala Mikro di Kelurahan	%	100		88.308.000			
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Pemenuhan Sarana dan Prasarana PPKM Skala Mikro di Kelurahan	Bulan	8	2	88.308.000			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis Barang dan jasa penunjang pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Kelurahan yang di sediakan	Jenis	16		88.308.000			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	%	100	50	275.460.000	76.705.100	27,85	33,46
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan	Jenis	2	1	275.460.000	76.705.100	27,85	33,46
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan	Unit	3	1	90.000.000	-	83,33	83,33
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan (Kegiatan)	0	0	0	185.460.000	76.705.100	41,36	49,69
		Jumlah Insentif Ketua RT yang disediakan (OB)	OB	96	48				
		Jumlah Honor Petugas Pengelola Sampah (OB)	OB	60	30				
		Jumlah Honor Kader Posyandu yang disediakan (OB)	OB	36	18				
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%			6.124.121.799	2.063.663.801	33,70	46,52

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Kotawaringin Lama telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 46,52%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

**Tabel 2.36 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	90,56	2.382.008.800	1.261.000.045,00	52,94	46,21
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokum en	9	7	12.051.000	1.888.850,00	15,67	66,67
		dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai Skor	60	50,80				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokum en	4	2	3.015.000	-	-	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Dokum en	1	1	1.582.500,00	-	-	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokum en	1	1	1.582.500,00	-	-	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	Dokum en	1	1	2.099.150	880.000,00	41,92	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokum en	1	1	2.103.000	-	-	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokum en	1	1	1.668.850	1.008.850,00	60,45	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis	4	4	2.136.653.760	1.155.493.491,00	54,08	62,50
		Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	30,45				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokum en	25	12	2.117.540.160	1.148.800.491,00	54,25	50,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokum en	1.000	295	9.383.600	3.200.000,00	34,10	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lapora n	1	1	4.450.000,00	2.833.000,00	63,66	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Dokum en	25	12	5.280.000,00	660.000,00	12,50	50,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	0	-	-	-	
		Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	90	0				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	0	0	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan yang diikuti	0	0	0	-	-	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	4	4	51.618.790	25.971.320,00	50,31	59,63
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	61				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	7	2.669.030	1.995.000,00	74,75	74,75
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	30	30	15.121.510	9.646.320,00	63,79	63,79
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	1	1	4.568.250	1.785.000,00	39,07	50,00
		Jumlah penggandaan	Lembar	10.046	6.072				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	200	175	29.260.000	12.545.000,00	42,87	50,00
		Jumlah aktifitas rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	OK	147	78				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Jenis	2	0	-	-	-	
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	0				
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	0	0	0	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	0	0	-	-	-	

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	2	2	159.899.480	71.476.384,00	44,70	50,00
		Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	50				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	50.254.920	25.716.873,00	51,17	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	109.644.560	45.759.511,00	41,73	50,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	4	3	21.785.770	6.170.000,00	28,32	38,43
		Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	90	84,62				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	1	1	10.749.340	1.300.000,00	12,09	50,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	8	6	1.972.500	-	-	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	4	4	9.063.930	4.870.000,00	53,73	53,73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah aula yang dipelihara	0	0	0	-	-	-	-
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	0	0				
		Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0	0	0				
		Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0	0	0				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	95	87,05	77.460.200	33.545.662,00	43,31	50,00
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan	Dokumen	775	597	77.460.200	33.545.662,00	43,31	50,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan	%	90	77,03	4.225.000	2.375.000,00	56,21	50,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
		Jumlah perijinan yang diterbitkan	Dokumen	40	23				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah non perijinan yang diterbitkan	Dokumen	753	574	73.235.200	31.170.662,00	42,56	50,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	90	90	12.600.000	9.190.000,00	72,94	100,00
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	Desa	15	15	12.600.000	9.190.000,00	72,94	100,00
		Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	90	90				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	kegiatan	5	2	12.600.000	9.190.000,00	72,94	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	90	80,59	47.830.000	12.240.000,00	25,59	47,22
10	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	Desa	15	12	47.830.000	12.240.000,00	25,59	47,22
		Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	90	80,59				
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaporkan data kependudukan	Desa	17	17	-	-	-	-
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	Desa	17	17	11.760.000	4.550.000,00	38,69	50,00
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang dibina perangkat desanya	Desa	17	-	6.250.000	690.000,00	11,04	50,00
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang dibina BPDnya	Desa	17	17	3.000.000	1.470.000,00	49,00	50,00
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota satlinmas, satlak dan satgas bencana yang dibina dan difasilitasi	Orang	0	-	6.575.000	2.350.000,00	35,74	50,00
		Jumlah desa yang aktif kegiatan siskamling	Desa	17	17				
		Jumlah karhutla yang tertangani	Titik Api	4	-				
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader PKK Kecamatan yang difasilitasi	Orang	10	10	13.300.000	1.940.000,00	14,59	50,00
		Jumlah fasilitasi bidang keagamaan	Kegiatan	10	8				
		Jumlah fasilitasi bidang kesehatan	Kegiatan	10	10				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
		Jumlah fasilitasi bidang sosial dan Kemasyarakatan	Kegiatan	24	15				
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran	Desa	17	17	1.875.000	-	-	25
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	Desa	3	5	4.570.000	1.240.000,00	27,13	50
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa lahan	Desa	3	3				
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan lomba	Desa	4	1	500.000	-	-	100
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%		87,05	2.519.899.000	1.315.975.707,00	52,22	60,86

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Pangkalan Banteng telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 87,05%, yang termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel 2.37 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	PANGKALAN LADA		%	95%	54%	2.216.147.600,00	1.090.802.984	49,22	54,40
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	90	50	2.159.127.900,00	1.051.503.284	48,70	60,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	90	50	2.640.000,00	1.760.000	66,67	60,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan yang di susun	Dok	5	4	2.640.000,00	1.760.000	66,67	60,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan Pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%	90	5	1.911.732.000,00	953.083.098	49,85	75,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	6	1.910.192.000,00	951.543.098	49,81	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dok	1	1	1.540.000,00	1.540.000	100,0 0	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin pegawai dan Kapasitas Sumberdaya	%	90	90	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain dinas yang di buat	Stell	3	0	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	OK	5	0	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Adminitasi Perkantoran	%	90	75	84.157.368,00	37.361.432	44,39	60,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	9	9	4.012.690,00	-	-	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis	5	3 J	24.325.158,00	16.597.682	68,23	70,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang diadakan	4 Tbg	4	0	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak penggandaan	3 Jenis	3	3	15.669.520,00	9.893.750	63,14	70,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat dan Rapat Koordinasi yang diikuti	156 OK	156	121	40.150.000,00	10.870.000	27,07	50,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Adminitasi Perkantoran	%	90	50	146.262.341,00	57.873.729	39,57	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air, listrik, internet(bulan)	Bulan	12	6	34.272.000,00	14.690.189	42,86	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorer dan Jasa pelayanan	Bulan	12	6	111.990.341,00	43.183.540	38,56	50,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Adminitasi Perkantoran	%	90	50	14.336.191,00	1.425.025	9,94	55,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara	Unit	1	1	2.993.191,00	1.425.025	47,61	55,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang di pelihara	Unit	3	0	1.463.000,00	-	-	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	3	0	6.450.000,00	-	-	60,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	0	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Unit	13	0	3.430.000,00	-	-	25,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu	%	90	33	4.400.000,00	880.000	20,00	50,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu	0%	90	13	1.760.000,00	880.000	50,00	50,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rekomendasi IMB yang diterbitkan	Dok	200	25	1.760.000,00	880.000	50,00	50,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan	%	90	55	2.640.000,00	-	-	50,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Rekomendasi dokumen yang di keluarkan	Dok	200	110	2.640.000,00	-	-	50,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang mengikuti kegiatan Musrenbang	%	90	100	10.725.000,00	9.625.000	89,74	92,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Musrenbang	90%	90	100	10.725.000,00	9.625.000	89,74	92,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi	Kali	1	1	10.725.000,00	9.625.000	89,74	92,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa yang melaksanakan Pilkades	%	90	0	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa yang melaksanakan Pilkades	%	90	0	-	-	-	-
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	Desa	3	0	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi	%	90	60	41.894.700,00	28.794.700	68,73	70,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan di fasilitasi	Desa	11	7	41.894.700,00	28.794.700	68,73	70,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan Perkedes	Desa	11	7	7.700.000,00	4.400.000	57,14	60,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	11	7	1.760.000,00	1.100.000	62,50	65,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	11	7	1.100.000,00	-	-	50,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pelatihan yang diadakan	Kali	1	1	12.974.700,00	12.974.700	100,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pembangunan rakyat	Bulan	12	7	15.280.000,00	7.900.000	51,70	65,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	7	2.200.000,00	2.200.000	100	100,00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian sengketa/ tata batas	Desa	4	3	880.000,00	220.000	25,00	50,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dibina	Desa	11	7	-	-	-	-
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%	95%	54%	2.216.147.600	1.090.802.984	49,22	54,40

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Pangkalan Banteng telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 54,40%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.33. Urusan Pengawasan Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Pengawasan diampu oleh Inspektorat dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.11,026,618,696,00 dan terealisasi sebesar Rp.3,043,080,535 atau 27,60%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,94% Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang pengawasan selengkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.38 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	64	7,650,923,108	2,697,529,496	35.26	37.51
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12	5	11,099,250	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	1	1,199,900	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1,199,800	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1,199,800	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	2,499,950	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	2,499,950	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	2,499,850	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	27	13	6,084,687,063	2,505,696,975	41.18	41.18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	12	6	6,071,337,913	2,503,446,975	41.23	41.23
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	6	11,000,000	1,500,000	13.64	13.64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	1,349,200	750,000	55.59	55.59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Laporan	2	-	999,950	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	3	2	436,080,000	43,694,157	10.02	10.02
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	2	-	1,200,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	OK	40	17	383,500,000	33,829,757	8.82	8.82
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	OK	4	1	51,380,000	9,864,400	19.20	19.20
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	6	5	334,465,084	42,077,460	12.58	11.55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	-	3,426,214	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	39	20	58,506,950	14,626,460	25.00	25.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	26	21	24,976,140	9,632,300	38.57	29.94
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	5	3	27,205,780	11,214,000	41.22	41.22
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	OK	36	4	220,350,000	6,604,700	3.00	3.00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Jenis	10	-	463,966,811	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jenis	4	-	67,594,373	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	6	1	396,372,438	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	3	235,952,400	92,126,904	39.04	39.04
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Paket	300	25	2,699,200	430,000	15.93	15.93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	93,660,800	34,453,761	36.79	36.79
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan dan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	139,592,400	57,243,143	41.01	41.01
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	18	2	84,672,500	13,934,000	16.46	16.46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	10	1	40,251,500	8,034,000	19.96	19.96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	8	3	44,421,000	5,900,000	13.28	13.28

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya pada wilayah I - IV	%	95	32	2,585,470,350	297,286,488	11.50	29.61
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang berkualitas	Laporan	110	36	2,072,234,600	265,751,488	12.82	34.55
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	54	-	600,184,700	38,650,000	6.44	18.89
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	37	27	548,696,000	57,420,000	10.46	31.94
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	2	2	68,850,000	51,680,000	75.06	100.00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	1	1	166,304,950	34,274,950	20.61	28.98
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	4	-	159,429,900	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	12	6	528,769,050	83,726,538	15.83	61.91
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang berkualitas	Laporan	12	3	513,235,750	31,535,000	6.14	9.70
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	4	-	20,236,000	-	-	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	8	3	492,999,750	31,535,000	6.40	10.10
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level III	%	95	33	790,225,238	48,264,551	6.11	7.08
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang tersusun pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Dokumen	3	1	125,814,950	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen yang tersusun pada perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasan	Dokumen	3	1	50,814,950	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen hasil survey yang tersusun	Dokumen	-	-	75,000,000	-	-	-
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil kegiatan pendampingan, asistensi, koordinasi dan monitoring yang dilakukan	Laporan	38	28	664,410,288	48,264,551	7.26	8.42

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pengawasan	Laporan	31	26	242,948,600	10,100,000	4.16	7.33
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan	Laporan	10	2	421,461,688	38,164,551	9.06	9.06
		Rata-rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	43	11,026,618,696	3,043,080,535	27.60	31.94

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Urusan Pengawasan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 43%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.34. Unsur Perencanaan

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.7,318,471,204,00 dan terealisasi sebesar Rp.3,127,136,522,00 atau 42,73%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang perencanaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.39 Realisasi Urusan Penunjang Perencanaan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	48				
1.	Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	11	3	29,060,750	8,657,850	29.79	36.42
		Jumlah Koordinasi	kali	11	-				
	Penyusunan Dok. Prenc. Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	3	1	17,315,000	4,104,900	23.71	30.55
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA	dok	1	-	2,599,700	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA Perubahan SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dok	1	-	2,599,700	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA	dok	1	1	2,700,000	2,698,250	99.94	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA Perubahan SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dok	1	-	1,754,850	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	dok	1	1	2,091,500	1,854,700	88.68	100.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	dok	12	6	4,620,201,221	2,420,635,495	52.39	13.13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji	dok	12	6	4,614,627,871	2,420,635,495	52.46	52.54
	Pelaksanaan dan Pengujian /verf. Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaankeuang an	jenis	3	1	3,755,000	-	-	-
	Koordinasi Penyusn. Laporan Keuangan akhir thn	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	Lap	1	1	1,030,950	-	-	-
		Jumlah Koordinasi	kali	3	1				
	Koordinasi dan penyus. Lap keu. Bin/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	lap	12	6	787,400	-	-	-
		Jumlah Koordinasi	kali	12	6				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	dok	4		742,700	-	-	-
		Pengelolaan BMD yang baik		100					
	Penyusunan Perc. Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	dok	1	1	305,200	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Asuransi	dok	1		-	-	-	-
	Penatausahaan Barag Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang	dok	1	-	437,500	-	-	-
4.	Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan . Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	dok	1	-	379,050	-	-	-
	Pengolahan data Retribusi daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Retribusi Daerah	dok	1	1	379,050	-	-	-
5.	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	Keg	9	-	600,000	-	-	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya	stel	1	1	600,000	-	-	100.00
	Pendidikan dan pelatihan peg. Berdsrkan tgs dan fungsi	Jumlah Pelatihan	Keg	1	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bimtek	Org	8	-	-	-	-	-
6	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	jenis	101	81	118,206,697	98,159,805	47.14	32.51
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	jenis	8	3	10,969,486	-	-	70.58

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	65	55	-	66,497,420	73.88	100.00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan RT yang disediakan	jenis	18	-	8,091,017	-	-	-
	Penyediaan bahan logistik ktr	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	2	2	960,000	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	8	6	15,876,194	-	-	-
	Penyelenggaraan rapat koord dan konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	29	15	82,310,000	31,662,385	38.47	41.36
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarpras aparatur yang disediakan	unit	7	7	90,524,940	35,640,000	39.37	100.00
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang diadakan	unit	7	7	90,524,940	35,640,000	39.37	100.00
8	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bln	12	6	576,979,520	220,204,284	38.17	27.94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang dikirim	Paket	10	1	280,000	-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, SDAir, dan listrik	bln	12	6	137,399,020	62,102,289	45.20	46.96
		Jumlah jasa publikasi surat kabar dan majalah	bln	12	6				
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	bln	12	6	439,300,500	158,101,995	35.99	36.85
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	bln	12	6				
9	Pemeliharaan barang Milik daerah penuj. Urusan pem. daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan	Unit	78	21	86,982,230	5,235,000	6.02	24.83
	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak kend. Perorg dns atau kend. Dns jbtan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan perorangan dinas jabatan	Unit	1	1	29,695,095	5,235,000	17.63	39.42
	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kend. Opr. Atau lapangan.	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	19	7	14,937,135	-	-	66.25
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	57	9	42,350,000	-	-	-
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Perencanaan Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	%	100					

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyusunan Perenc, dan Pendanaan	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Perencanaan Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	%	100		842,112,700	69,703,897	8.28	45.62
	PENYUSUNAN RENCANA DAN PENDANAAN	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	dok	2					
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik	kali	1	1	11,087,500	11,035,000	99.53	100.00
	Koordinasi pelaks. Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi	kali	1	1	15,575,000	3,150,000	20.22	100.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/kota	Jumlah Musrenbang Kab yang dilaksanakan	kali	1	1	33,695,000	4,800,000	14.25	69.11
	Koord. Peny. Dan penetapan Dok. Prenc. Pembg. Daerah kab/kota	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	kali	8	8	781,755,200	50,718,897	6.49	13.38
		Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	kali	6	6				
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	dok	2					
11	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bid. Perc. Pembg. Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang disusun	dok	1	1	57,112,500	1,925,000	3.37	27.75
		Dokumen data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	dok	1	1				
	Analisis data dan informasi perc. Pembg. Daerah	Jumlah laporan analisis data dan informasi PPD	laporan	4		24,820,000	1,925,000	7.76	31.70
	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perc. Pembg. SKPD	Jumlah SKPD yang dibina dan memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	SKPD	38	38	32,292,500	-	-	24.71
12	Pengend, evaluasi dan pelaporan bid. Perc. Pembg. Daerah	Jumlah pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	bulan	12	6	257,353,800	113,899,226	44.26	48.60
	Koord. Pengend perenc dan pelaks. Pembg. Daerah di kab/kota	Jumlah asistensi	kali	8	4	174,414,000	55,574,749	31.86	37.33
		Jumlah evdal DAK	laporan	12	6				
		Jumlah evdal RPJMD	laporan	4	2				
		Jumlah Koordinasi evaluasi dan capaian program SKPD	kali	12	6				
		Jumlah Koordinasi ke Provinsi	kali	8	4				
		Jumlah Rakordal Pembangunan Daerah	kali	4	2				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi pelaporan ke Provinsi	kali	2	2	82,939,800	58,324,477	70.32	72.31
		Jumlah monitoring program dan kegiatan perangkat daerah	kali	5					
		Jumlah rakor penyusunan LKPJ	kali	2	1				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentaser Perangkat Daerah Mitra BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	%	100	50				
13	Koord. Perc. Bid. Pemerintahan dan Pembg. Manuasia	Jumlah Laporan Sub Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia dalam menunjang konsistensi PPD	Laporan	12	6	516,632,350	88,307,515	37.50	50.01
		Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	kali	144	0				
	Koord. Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	7	3	22,940,000	10,605,400	46.23	73.84
	Asistensi Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pemerintahan	Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Pemerintahan	kali	21	14	46,699,850	18,893,255	40.46	40.64
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pemerintahan	Jumlah monev Penyusunan PPPD Bidang Pemerintahan	kali	17	-	-	-	-	-
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi PPD Bidang Pemerintahan	kali	24	15	23,054,600	4,609,800	20.00	50.71
	Koord. Peny. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Pembg. manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	7	3	24,005,000	7,234,950	30.14	71.82
	Asistensi Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pembg. Manusia	Jumlah asistensi Penyusunan Dokumen PPD Bidang Pembangunan Manusia	kali	27	15	89,240,200	34,908,710	39.12	39.31
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pembg. Manusia	Jumlah monev penyusunan PPD Bidang Pembangunan Manusia	kali	17	-	1,815,000	1,815,000	100.00	100.00
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Pembg. Manuasia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi PPD Bidang Pembangunan Manusia	kali	24	17	27,705,000	10,240,400	36.96	57.76
14	Koord. Peny. Bid. Perekonomian dan SDA (sumber Daya Alam)	Jumlah laporan Sub Bidang Perekonomian dan SDA dalam menunjang konsistensi PPD	Laporan	12	6	177,988,300	36,663,460	20.60	35.00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	kali	96	22				
	Koord. Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	5	-	17,335,000	-	-	43.93
	Asistensi Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Perekonomian	kali	20	10	49,016,700	19,224,505	39.22	40.18
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Perekonomian	kali	8	0	9,557,900	-	-	-
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Perekonomian	kali	7	1	13,035,000	500,000	3.84	71.08
	Koord. Peny. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	5	1	14,239,800	593,950	4.17	43.54
	Asistensi Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang SDA	kali	15	10	48,942,600	16,345,005	33.40	39.89
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. SDA	Jumlah Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang SDA	kali	10	-	13,080,100	-	-	-
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang SDA	kali	5	-	12,781,200	-	-	-
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Mitra BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	%	100	50				
15	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah laporan Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam menunjang konsistensi PPD	Laporan	12	6	1,365,835,000	28,104,990	20.86	44.72
		Jumlah koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	kali	100	26				
	Koord. Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	8	3	18,824,950	8,890,650	47.23	51.98
	Asistensi Peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Infrastruktur	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Infrastruktur	kali	16	4	14,759,950	2,649,900	17.95	40.31

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat darahbid. Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Infrastruktur	kali	12	2	9,519,950	-	-	-
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Infrastruktur	kali	10	4	27,178,650	-	-	18.40
	Koord. Penys. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali	8	3	19,881,650	12,599,490	63.37	100.00
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Kewilayahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Kewilayahan	kali	24	6	14,759,950	2,915,000	19.75	24.62
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat darah bid. Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Kewilayahan	kali	12	2	9,519,950	-	-	-
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Kewilayahan	kali	10	2	20,309,950	1,049,950	5.17	78.83
						8,740,711,758	3,127,136,522		

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Urusan Perencanaan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 41%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.35. Unsur Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Keuangan diampu oleh dua Perangkat Daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah alokasi anggaran belanja sebesar Rp.7,532,455,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3,463,961,205,00 atau 45,99%, dan realisasi fisik sebesar 47,33%. Sedangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 178,500,750,238,00 dengan realisasi sebesar Rp37,620,036,957,00 atau 21,08%, dan realisasi fisik sebesar 29,96%. Adapun realisasi anggaran untuk Unsur penunjang keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.40 Realisasi Unsur Penunjang Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	BPKAD								
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	98.65%	6,165,553,878	3,053,796,603	49.53	52.25
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	99.84%	10,418,600	3,157,700	30.31	30.58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	-	1,257,550	911,400	72.47	73.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Laporan	2	-	1,624,900	347,200	21.37	22.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Laporan	2	-	1,624,900	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Laporan	2	-	1,624,900	1,069,600	65.83	66.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Laporan	2	-	1,624,900	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	2	-	1,524,100	829,500	54.43	55.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	-	1,137,350	-	-	-
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,887,282,171	2,368,997,249	48.47	49.97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	9	4,866,906,571	2,360,651,949	48.50	50.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	-	-	15,690,000	7,450,000	47.48	50.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	3,606,200	895,300	24.83	25.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Laporan	2	-	1,079,400	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan barang milik Daerah	%	100	43.01%	3,214,000	3,214,000	100.00	100.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang milik Daerah	Persil	1	1	3,214,000	3,214,000	100.00	100.00
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	99.77%	37,560,000	30,652,596	81.61	85.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	OK	59	5	37,560,000	30,652,596	81.61	85.00
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	98.65%	295,139,087	246,236,662	83.43	85.05
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	9	8	9,999,924	9,999,000	99.99	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat/Bahan Alat Tulis Kantor yang Disediakan	jenis	29	19	109,999,285	109,867,870	99.88	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	9	9	94,999,878	82,575,980	86.92	90.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	4,290,000	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Kali	80	60	75,850,000	43,793,812	57.74	60.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	100%	99.57%	49,583,468	4,918,500	9.92	10.02
	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	jenis	5	1	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	132	19	49,583,468	4,918,500	9.92	10.02
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				655,230,752	274,296,210	41.86	50.67
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket / surat yang terkirim	Paket/ Surat	60	60	1,470,000	277,000	18.84	24.00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	9	197,992,352	111,537,901	56.33	57.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	12	9	455,768,400	162,481,309	35.65	48.00
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	100%	99.57%	227,125,800	122,323,686	53.86	67.43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	20	7	17,488,000	15,567,030	89.02	90.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	82,557,800	58,766,769	71.18	72.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	179	115	94,040,000	47,989,887	51.03	52.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Unit	1	1	33,040,000	28,938,250	87.59	88.00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					171,571,759,400	34,415,420,480	20.06	29.50
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100%	94.87%	816,820,300	106,767,481	13.07	13.76
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	12,785,000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	11,410,000	661,850	5.80	6.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	60,600,000	-	-	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	53,875,000	-	-	-
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	5,130,000	5,130,000	100.00	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda Tentang APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1	45,377,500	4,015,406	8.85	10.00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	1	48,274,800	1,625,000	3.37	5.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1	125,000,000	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	437,968,000	79,010,225	18.04	19.00
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	Orang	100	-	16,400,000	16,325,000	99.54	100.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					526,884,400	272,741,151	51.76	53.08
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		-	-	208,328,000	102,400,822	49.15	50.00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		-	-	26,970,000	26,912,238	99.79	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, serta Penerbitan SKPP		-	-	31,920,000	2,098,426	6.57	7.00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan SPJ		-	-	2,000,250	1,902,250	95.10	100.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	257,666,150	139,427,415	54.11	56.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100%	94.66%	447,722,600	207,033,948	46.24	48.09
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	2	2	30,650,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Dokumen	1	1	388,032,600	179,708,948	46.31	48.00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	29,040,000	27,325,000	94.09	100.00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan		-	-	169,747,331,100	33,795,877,900	19.91	29.25
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Orang	130	80	1,149,999,100	847,000,000	73.65	80.00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Orang	130	80	152,441,809,000	31,125,557,100	20.42	22.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Orang	130	80	4,000,000,000	-	-	-
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Orang	130	80	12,155,523,000	1,823,320,800	15.00	15.00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				33,001,000	33,000,000	100.00	100.00
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang dikembangkan	Update	1	1	33,001,000	33,000,000	100.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Pengelolaan barang milik Daerah				763,436,960	150,819,874	19.76	22.20

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan barang milik Daerah	%	100%	43.01%	763,436,960	150,819,874	19.76	22.20
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Bidang Tanah	3	1	33,657,000	450,000	1.34	5.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	91,621,400	-	-	-
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang milik Daerah		-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	-	-
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Aset milik Daerah yang terinventarisasi dan teridentifikasi serta terdokumentasi		-	-	22,686,900	1,470,000	6.48	10.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang milik Daerah	Persil	1	1	231,096,500	53,851,000	23.30	28.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang milik Daerah	Dokumen	1	1	48,682,500	5,980,000	12.28	15.00
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	48,062,500	-	-	-
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset milik Daerah yang terinventarisasi dan teridentifikasi serta terdokumentasi	Persil	1	1	237,712,400	87,662,374	36.88	48.00
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	49,917,760	1,406,500	2.82	5.00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	-
TOTAL						178,500,750,238	3,463,961,205	45.99	47.33

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	47,55%	5.781.028.452	2.679.755.455	46,35	47,55
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Dokumen	21	-	7.455.500	3.073.050	41,22	56,30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	650.000	650.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.137.500	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.137.500	-	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.023.750	1.023.750	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.023.750	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	12	-	1.189.500	499.800	42,02	50,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	1	1.293.500	899.500	69,54	70,00
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	90	49,16%	4.811.892.099	2.365.285.084	49,15	49,16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Bulan	14	6	4.671.451.049	2.307.458.984	49,39	49,39
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12	6	136.700.000	56.076.100	41,02	41,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	-	3.741.050	1.750.000	46,78	46,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Dokumen	1	1	325.000	-	-	-
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	%	80	-	5.000.000	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen asuransi barang yang tersedia	Dokumen	1	-	5.000.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	90	100	600.000	600.000	100,00	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	1	1	600.000	600.000	100,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	ok	5	5	-	-	-	-
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	90	27,53	262.208.706,00	71.732.570	27,36	27,53
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	4	3	3.781.800	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	51	44	76.975.426	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	26	4	13.357.410	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	12	12	60.464.070	40.664.070	67,25	68,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	kali	30	8	107.630.000	31.068.500	28,87	28,87
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	-	27.096.234	16.795.000	61,98	62,74
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	3	-	11.000.000	11.000.000	100	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis/unit	1	1	16.096.234	5.795.000	36,00	37,28
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	49,95	546.201.288	207.343.951	37,96	49,95
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	paket/surat	15	6	525.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	9	286.651.488	103.710.658	36,18	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	bulan	12	9	259.024.800	103.633.293	40,01	50,00
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah	%	90	13,47	120.574.625	14.925.800	12,38	13,47

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	1	-	17.178.800	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	24	7	40.958.950	1.425.800	3,48	3,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis/ unit	8	2	53.136.875	13.500.000	25,41	27,78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	-	9.300.000	-	-	-
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	80	35,82	1.751.101.548	784.205.750	44,78	46,62
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	80	35,82	1.751.101.548	784.205.750	44,78	46,62
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan target pajak daerah	Dokumen	2	1	9.076.700	4.199.700	46,27	35,46
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penambahan Menu/Fitur aplikasi	Menu/Fitur	3	-	382.697.720	47.775.200	12,48	15,46
		Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun/di revisi	Dokumen	3	-				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	125	26.743.900	2.400.000	8,97	9,92
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah penyediaan sarana prasarana pengelolaan pajak daerah	Bulan	12	6	136.865.828	117.760.500	86,04	86,04
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak baru	objek	4.100	2.974	110.609.800	63.826.600	57,70	57,86
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan	objek	5.100	10.077	165.474.900	71.647.700	43,30	43,81
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang dilakukan penilaian	Dokumen	24	8	8.534.600	8.236.000	96,50	100,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	objek	8.100	3.034	306.715.500	177.558.900	57,89	58,07
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	survey kepuasan masyarakat	Dokumen	1	1	4.004.000	4.000.000	99,90	100,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan wajib pajak yang diteliti dan diverifikasi	WP	12	4	100.855.800	35.705.950	35,40	37,19
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi penagihan penerimaan pajak daerah	Rp.	19.400.000.000	750410917,91	366.725.700	145.145.900	39,58	43,56
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani tepat waktu	Dokumen	95	89	50.480.100	42.731.900	84,65	85,01
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Pajak Daerah	Dokumen	12	6	79.980.000	63.217.400	79,04	79,66
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	12	6	2.337.000	-	-	-
	TOTAL					7.532.130.000	3.463.961.205	45,99	47,33

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Urusan Keuangan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 47.33%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.36. Unsur Kepegawaian

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Kepegawaian diampu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp5,817,608,634.00 dan terealisasi sebesar Rp2,536,270,692.00 atau 43,5 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,28 %. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41 Realisasi Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100.00	61.90				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	5	3	39,555,000	16,331,700	41.29	49.29

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	5	3	35,328,000	14,371,700	40.68	45.76
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	0	980,000	-	-	-
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	0	780,000.00	-	-	-
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	1	980,000.00	980,000	100	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	0	507,000	-	-	50.00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	12	6	980,000	980,000	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	16	7	4,002,916,374	1,981,130,730	49.49	53.66
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	8	3,996,661,524	1,976,525,880	49.45	49.65
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	dokumen	50	166	3,100,000	2,000,000	64.52	65.00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	1	2,604,850	2,604,850	100	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	laporan	1	1	550,000.00	-	-	-
									-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	jenis	2	1	1,800,000.00	-	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	stel	3	2	1,800,000	-	-	-
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	orang	5	0	-	-	-	-
									-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	bulan	12	6	138,419,528	90,951,127	65.71	76.85
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	7	7	7,227,825	7,216,000	99.84	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	50	50	61,236,747	61,234,250	100	100
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	17	14	4,288,559	2,909,500	67.84	100.00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	6	3	22,846,397	10,199,200	44.64	46.75
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	orang/kali	13	4	42,820,000	9,392,177	21.93	37.50
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	jenis	1	0	8,604,992	-	-	-
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jenis	1	0	8,604,992	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	bulan	12	6	339,619,186	140,361,144	41.33	38.56
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	paket/surat	35	5	1,225,000	-	-	15.67
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	12	6	113,620,579	42,458,553	37.37	50.00
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	bulan	12	6	224,773,607	97,902,591	43.56	50.00
		Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	bulan	12	6				-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	1	46,853,300	12,251,558	26.15	23.73
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	unit	14	2	26,375,800	5,561,558	21.09	25.00
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan dan mesin lainnya	jenis	4	0	20,477,500	6,690,000	32.67	22.45

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	84.00	60.13	288,588,154	36,620,538	12.69	27.37
8.1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti pembekalan	orang	141	0	104,066,550	7,110,488	6.83	6.83
		Jumlah formasi CPNS usulan Tahun 2022	orang	200	314				
8.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usulan UKP pengabdian dan pensiun	orang	135	72	21,259,950	9,709,950	45.67	43.15
8.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi lembaga profesi ASN lainnya	kegiatan	1	0	141,661,554	19,270,200	13.60	9.99
		Jumlah rapat pembinaan kepegawaian	kegiatan	7	4				
		Terlaksananya kegiatan HUT Korpri	kegiatan	1	0				
8.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data PNS yang dikelola	orang	4026	3998	21,600,100	529,900	2.45	3.00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	84	60.13				-
9	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	84	60.13	221,692,200	71,514,406	32.26	38.62
9.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah pelantikan jabatan struktural dan fungsional	orang	1000	399	167,528,200	49,912,606	29.79	41.12
		Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan/assesment	orang	15	42				
9.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK pencantuman gelar	dokumen	10	43	54,164,000	21,601,800	39.88	36.11
		Jumlah SK peninjauan masa kerja	dokumen	5	0				
		Jumlah SK UKP PNS dan SK pengangkatan CPNS	dokumen	400	280				
		Jumlah SK pengangkatan CPNS	dokumen	141	0				
									-
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	84	60.13	540,365,600	120,618,350	22.32	50.00
10.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	orang	35	21	7,692,200	-	-	25.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi sekolah kedinasan	orang	5	50	532,673,400	120,618,350	22.64	25.00
		Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	orang	9	9				-
		Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi Tubel dan Ijin Belajar	orang	30	23				
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	%	6.25	50	189,194,300	66,491,139	35.14	38.50
11.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan Karis/Karsu	dokumen	100	134	24,967,350	7,417,750	29.71	30.00
		Jumlah usulan Karpeg	dokumen	100	4				
		Jumlah usulan piagam satyalencana karsyasatya	orang	70	487				
		Jumlah usulan taspen	dokumen	100	57				
11.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah peserta sumpah janji PNS	orang	100	0	147,465,750	56,687,000	38.44	38.50
11.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin	orang	15	7	13,831,700	2,386,389	17.25	25.90
11.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah PNS yang melaksanakan ijin cerai	orang	12	7	2,929,500	-	-	-
						5,817,608,634	2,536,270,692		-

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Kecamatan Arut Selatan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 43.28%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.37. Unsur Pendidikan dan Pelatihan Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Pendidikan dan Pelatihan diampu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp1,738,424,436.00 dan terealisasi sebesar Rp480,220,457.00 atau 28%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,75%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.42 Realisasi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	%	76.00	9.67				
12	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	%	76	9.67	-	-	-	-
12.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	orang	5	-	-	-	-	-
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			76		1,738,424,436	480,220,457	27.62	35.75
13.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	orang	23	15	1,738,424,436	480,220,457	27.62	35.75
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	orang	132	0				
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%		43.90	1,738,424,436	480,220,457	39.92	43.23

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Urusan Penelitian dan Pengembangan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 5%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.38. Unsur Penelitian dan Pengembangan Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penelitian dan Pengembangan diampu oleh BAPPEDA dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.701,172,600,00 dan terealisasi sebesar Rp.15,005,505,00 atau 2%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43 Realisasi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Penelitian dan pengemb. Bid. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	laporan	5	2	610,975,000	213,500	0.03	1.71
	Fasilitasi, pelaks. Dan Pengemb. Bid. Pemerintahan umum	Jumlah kajian evaluasi target PAD Kobar	dok	1	-	600,525,000	-	-	-
		Jumlah kajian survey kepuasan masyarakat	dok	1	-				
		Jumlah laporan Litbang bidang pemerintahan umum	laporan	1	1				
	Pengelolaan data dan peraturan	Jumlah laporan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	laporan	1	1	10,450,000	213,500	2.04	100.00
		Jumlah laporan penghimpunan prestasi kabupaten kobar	laporan	1	-				
17	Penelitian dan pengemb. Bid. Ekonomi dan pembg.	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	dok	1	-	4,565,000	402,500	8.82	100.00
	Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah laporan litbang komunikasi dan informatika	laporan	1	-	4,565,000	402,500	8.82	100.00
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan inovasi dan teknologi	laporan	2	-	85,632,600	14,389,505	16.80	39.26
	Penelitian, pengemb. Dan perekayasaan di bid. Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan indeks daya saing daerah	laporan	1	1	85,632,600	14,389,505	16.80	39.26
		Jumlah laporan indeks inovasi daerah	laporan	1	-				
		Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja (Program)	%			701,172,600	15,005,505	39.18	41.07

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Urusan Penelitian dan Pengembangan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 41.07%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.39. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diampu oleh Badan KESBANGPOL dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 5,957,164,738,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,121,196,408,00 atau 35,61% dengan realisasi fisik sebesar 36,92%. Adapun realisasi anggaran pada Unsur Pemerintahan Umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44 Realisasi Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	50	3,912,627,538	1,945,754,408	49.73	48.72
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	27	15	73,458,950	29,704,110	40.44	41.93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	8	6	36,253,600	15,194,405	41.91	43.45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	19	9	37,205,350	14,509,705	39.00	40.45
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	515	254	3,506,542,797	1,763,133,134	50.28	48.99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	8	3,462,836,597	1,745,276,779	50.40	49.09
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	500	245	41,350,850	17,106,355	41.37	41.41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	2,355,350	750,000	31.84	31.84
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	1	13,530,000	10,413,000	76.96	137.12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	5	-	3,000,000	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan yang diikuti	Orang/kali	1	1	10,530,000	10,413,000	98.89	176.19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	4	4	105,271,314	56,277,437	53.46	62.22
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	5	5	1,757,063	1,757,063	100.00	142.25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	40	39	22,679,393	22,514,393	99.27	99.27

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	26,937	26,176	12,984,858	9,961,908	76.72	76.72
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	OK	18	9	67,850,000	22,044,073	32.49	44.98
	Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Jenis	1	0	4,947,492	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	0	4,947,492	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	2	2	179,186,965	73,018,227	40.75	34.59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	64,319,540	25,726,440	40.00	32.99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	6	114,867,425	47,291,787	41.17	35.49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	2	2	29,690,020	13,208,500	44.49	38.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	8	6	19,693,020	7,425,000	37.70	34.15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	14	9	9,997,000	5,783,500	57.85	45.65
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	%	29.05	25.43	456,333,300	101,860,800	22.32	22.84
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan pemuda-pemudi /pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Orang	300	300	456,333,300	101,860,800	22.32	22.84

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	Orang	0	0	337,753,000	2,750,000	0.81	1.47
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Orang	300	300	118,580,300	99,110,800	83.58	83.71
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	20.52	14.00	1,322,904,850	21,753,200	1.64	1.71
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	Orang	50	50	1,322,904,850	21,753,200	1.64	1.71
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, Serta Pemantauan Stiuasi di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	Orang	50	50	22,584,850	21,753,200	96.32	100.00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah peserta pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan Parpol	Orang	0	0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stiuasi Politik di Daerah								
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	Kegiatan	0	0	1,300,320,000	-	-	-
4	Program PEMBERDAYAAN dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	%	58	0	15,137,200	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PEMBERDAYAAN dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Orang	0	0	15,137,200	-	-	-
	Penyusunan Program Kerja di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	Orang	0	0	-	-	-	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembayaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	Laporan	3	0	15,137,200	-	-	-
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantrantibmas	%	100	50	250,161,850	51,828,000	20.72	66.48
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Kegiatan	51	25	250,161,850	51,828,000	20.72	66.48

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Laporan	15	3	13,891,950	-	-	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pamantauan Oran Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Kegiatan	3	1	24,520,600	-	-	5.61
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Kegiatan	48	24	211,749,300	51,828,000	24.48	77.89
								
TOTAL						5,957,164,738	2,121,196,408	35.61	36.92
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%	61.51	27.89				

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Unsur Pemerintahan Umum telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 27.89%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini karena perekonomian memiliki pengaruh besar terhadap taraf kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi suatu negara/wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Perwujudan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, serta dengan menyelenggarakan tata kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di tingkat pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara akumulatif yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya sektor perekonomian dalam pembangunan, maka dibutuhkan perencanaan atau kerangka pembangunan ekonomi yang selaras dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam hal ini Rancangan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjadi bagian penting dalam menyusun RKPD, agar tercipta keselarasan antara kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan.

3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

a) Kinerja perekonomian Periode 2016-2020

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup stabil, meski masih perlu perbaikan dalam beberapa indikatornya. Hal ini digambarkan dari capaian beberapa indikator makro ekonomi yang memiliki trend perkembangan positif, yakni perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), indeks gini, laju inflasi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut disajikan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga 2020.

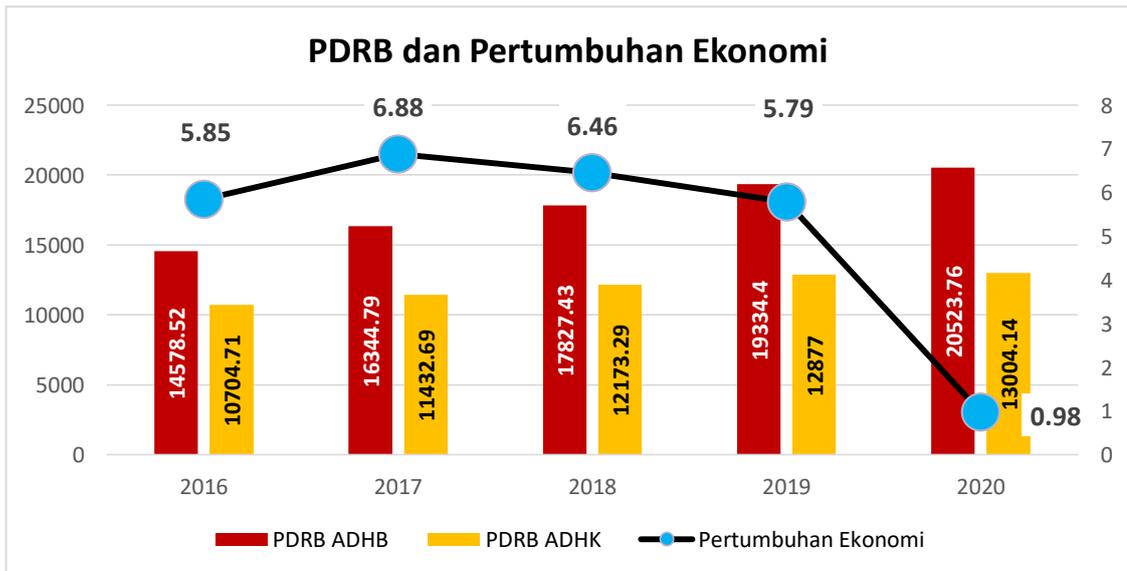
Tabel 3. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,85	6,88	6,46	5,79	0,98
2.	TPT	%	3,16	3,25	2,17	3,01	2,62
3.	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34
4.	IPM	Indeks		71,11	72,46	72,85	72,87
5.	PDRB ADHB	Rp (Milyar)	14.578,52	16.344,79	17.827,43	19.334,40	20.523,76
6.	Kemiskinan	%	4,96	4,52	4,27	4,11	3,59

Sumber : Bappeda dan BPS Kotawaringin Barat, 2016-2020

Pada bidang sosial, angka pengangguran Terbuka atau TPT juga mengalami prestasi dengan menurunnya angka TPT pada tahun 2020 menjadi 2,62% yang pada sebelumnya 3,01%. Meskipun capaian terbaik untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka paling rendah tercapai pada tahun 2018 dengan TPT sebesar 2,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja berjalan secara wajar dan efektif dengan tidak banyaknya jumlah PHK yang dapat meningkatkan TPT. Angka persentase kemiskinan juga mengalami tren penurunan di tahun 2020 dengan angka kemiskinan turun menjadi 3,59 dimana menjadi tahun terbaik selama tahun 2016-2020 yang merupakan usaha keras pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, memberikan kesejahteraan serta bertahan dalam kondisi pandemi yang tidak pasti.

Angka pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat pada setiap sektor ekonomi dapat dilihat dari perolehan PDRB ADHK dan PDRB ADHB. Dalam kurun 5 tahun terakhir, capaian PDRB ADHK Kabupaten Kotawaringin Barat sempat terlihat optimis pada 2 (dua) tahun pertama, namun terjadi trend penurunan sejak 3 tahun terakhir. Dan tahun terakhir dapat dikatakan sebagai tahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah. Meskipun demikian, nilai PDRB ADHB terus menunjukkan trend positif.



Gambar 3. 1 Perbandingan PDRB ADHB, ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

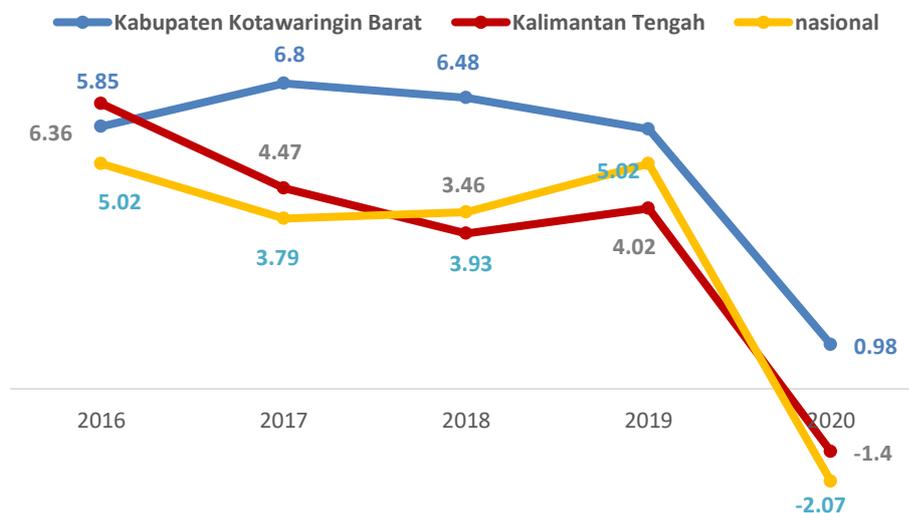
Sumber : BPS Kotawaringin Barat, 2021
 Keterangan : Angka 2020 merupakan Angka Sementara

b) *Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020*

Kondisi tahun 2020 dipenuhi ketidakpastian bagi pemerintah daerah, pemerintah nasional dan di tingkat global sejak munculnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kondisi ini menjadi tantangan yang berat, sebab pandemi berdampak pada melambatnya seluruh aktivitas ekonomi dan pembangunan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata dan bidang sosial lainnya. Sejumlah kebijakan diterapkan guna menekan sekaligus mencegah meluasnya pandemi, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat skala mikro, skala besar (antar daerah) hingga kebijakan larangan perjalanan antar negara, yang berimbas pada seluruh sector perekonomian mulai dari sektor primer hingga sektor tersier. Relaksasi aktivitas ekspor-impor sementara menyebabkan perlambatan di sektor perdagangan dan industri, serta sektor primer yang memproduksi komoditasnya, seperti pertanian dan pertambangan. Sementara pembatasan aktivitas skala mikro telah menyebabkan melesunya aktivitas perekonomian skala lokal.

Meskipun dalam hal pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai tahun terpuruk setelah krisis ekonomi tahun 1998, namun dapat dikatakan kondisi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada saat kondisi ekonomi nasional menurun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat bertahan di angka positif. Detail pertumbuhan antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional 2016-2020



Sumber : Data Diolah, 2021

Total pertumbuhan ekonomi nasional (YoY) pada 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% dan Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh minus 1,4%. Sementara di Kabupaten Kotawaringin Barat kondisi perekonomian daerah mengalami tren positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,98 %. Di sisi lain produktivitas PDRB ADHB juga mengalami kenaikan

produksi menjadi 20.523,76 Milyar dari tahun 2019 yakni sebesar 19.334,40 Milyar. Sehingga dari dua indikator ekonomi tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, melalui produktivitas masyarakat yang terjaga dan mobilitas yang kuat.

Dari segi produktivitas daerah Kabupaten Kotawaringin barat mencatat 17 sektor perekonomian yang memiliki peranan dan kategori masing masing sesuai dengan basis dan kekuatan perekonomian.

Tabel 3.2 Persentase Distribusi PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,88	25,75	24,87	23,87	25,39
B	Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,25	1,27	1,33	1,26
C	Industri Pengolahan	25,47	26,26	25,54	24,67	25,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	8,60	8,69	9,11	9,58	8,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	12,56	13,26	13,78	13,98
H	Transportasi dan Pergudangan	8,39	8,18	8,59	8,91	7,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38	1,35	1,36	1,40	1,27
J	Informasi dan Komunikasi	0,96	0,92	0,90	0,93	0,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,23	5,04	4,92	4,99	5,15
L	Real Estate	1,87	1,84	1,93	2,00	1,98
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	3,33	3,24	3,38	3,61
P	Jasa Pendidikan	2,67	2,55	2,65	2,76	2,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,13	1,17	1,20	1,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,96	0,96	1,00	1,03	0,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Kotawaringin Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Kotawaringin Barat disokong oleh dua sektor utama yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor yang kedua yakni sektor industri pengolahan. Kedua sektor tersebut secara agregat hampir >50% menjadi kontributor dalam perekonomian serta Neraca Domestik. Pada tahun 2020** Pertanian menyumbang 25,39% dan Industri pengolahan memiliki kontribusi 25,47 terhadap neraca domestik. Sektor ketiga yang memiliki kontribusi besar yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi diatas 12% dimana di tahun 2016-2020 nilai kontribusinya meningkat dengan ditandainya nilai kontribusi sektor perdagangan sebesar 13,98% dari total neraca domestik.

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat nampak didominasi oleh sektor primer dan sektor sekunder dengan diwakilinya sektor pertanian, keguatan dan perikanan untuk sektor primer dengan rata-rata 24% dan sektor sekunder dengan penyumbang kontribusi pada sektor industri pengolahan dengan rata-rata 25%. Sementara untuk sektor

tersier yakni sektor yang memberikan jasa layanan seperti perdagangan dan jasa-jasa non-tangible lainnya terkecuali untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih berkontribusi rendah. Struktur perekonomian tersebut sangat dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah. Dimana terdapat perbedaan antara bentuk administratif kota dan kabupaten. Daerah dengan kondisi geografis masih terdapat hamparan sawah, hutan, ladang akan cenderung berfokus kepada sektor primer sementara daerah dengan kondisi geografis sangat strategis dan berdemografis padat maka cenderung bergerak pada sektor sekunder dan tersier.

Selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan tiap-tiap sektornya, sektor yang memiliki pertumbuhan konstan atau stabil adalah pada sektor primer khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pertumbuhan 2,56% pada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertumbuhan sektor pertanian ini menurun dibandingkan tahun 2019 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini juga diakibatkan oleh kondisi pandemi dimana distribusi produk-produk hasil pertanian mengalami kendala pada distribusi dan pemasaran. Namun diperkirakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang akan tetap bertahan, karena sektor ini merupakan sektor primer yang berhubungan dengan hajat hidup serta kebutuhan pangan. Sementara pada sektor pertambangan dan penggalian nilai pertumbuhannya menurun menjadi -0,05%.

Tabel 3. 3 Persentase Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	7,15	6,77	3,78	2,56
B	Pertambangan dan Penggalian	5,90	-1,95	4,25	7,33	-0,05
C	Industri Pengolahan	5,25	9,30	7,52	5,41	3,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,61	2,47	7,36	10,72	9,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,03	3,37	7,00	9,34	-3,35
F	Konstruksi	5,48	6,74	5,00	8,03	-11,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,96	5,98	7,44	6,40	2,65
H	Transportasi dan Pergudangan	6,01	4,94	8,22	7,05	-8,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,85	5,58	5,74	6,86	-6,47
J	Informasi dan Komunikasi	7,23	4,57	2,96	8,12	7,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	4,67	2,17	6,49	8,77
L	Real Estate	6,53	2,24	6,25	6,60	2,83
M,N	Jasa Perusahaan	4,15	3,01	4,98	6,73	-12,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,32	7,14	-0,26	8,24	8,93
P	Jasa Pendidikan	5,09	3,34	6,97	8,22	7,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,39	4,19	5,98	7,68	26,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,96	6,55	7,80	7,34	-32,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,85	6,80	6,48	5,79	0,98

Sumber : BPS, Kabupaten Kotawaringin Barat dalam angka 2021

Sektor sekunder Industri pengolahan serta Pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana tidak menunjukkan tren kontraksi meskipun pertumbuhannya tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya. Sektor perdagangan juga mengalami pelemahan namun masih digolongkan memiliki tren positif dengan pertumbuhan 2,65%. Sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam adalah sektor tersier berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa perekonomian. Konsep sektor tersier adalah sektor ekonomi yang cepat tumbuh namun rentan bilamana dihadapkan dengan kondisi sosial masyarakat karena sektor ini tidak menghasilkan produk melainkan jasa yang erat kaitannya dengan mobilitas. Pada satu sisi mobilitas rendah maka dipastikan sektor jasa akan mengalami penurunan. Dari sektor tersier sektor yang mengalami penurunan adalah pada sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan dan jasa lainnya dimana kondisinya pertumbuhannya mengalami poin minus. Khususnya pada akomodasi dan makan minum serta jasa perusahaan yang menjadi intervensi daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat berkurangnya mobilitas masyarakat untuk menggunakan jasa. Akomodasi dan makan minum seperti penyediaan hotel serta warung dan resto yang juga mengalami penutupan akibat Pandemi

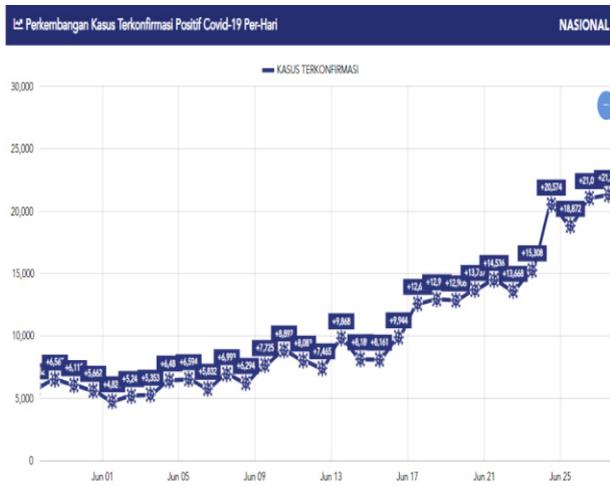
c) Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Pandemi covid-19 di tahun 2020, pada satu sisi menyebabkan ekonomi mengalami keterpurukan, namun di sisi lain memberikan dampak yang luar biasa terhadap percepatan teknologi dan informasi. Kebijakan *Work From Home* serta *School at Home* menjadi *trigger* bahwa teknologi menjadi hal yang datang bahkan sebelum masyarakat menyadari. Dengan kata lain penggunaan *IoT (Internet of Thinking)* bergerak lebih cepat dan dinamis seiring kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, pada awal 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai meluas ke berbagai negara, perekonomian global berjalan menjauhi ekspektasi awal. Berbagai lembaga dan institusi ekonomi dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2020 akan mengalami kontraksi cukup dalam. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 0,5%, proyeksi World Bank dalam rentang -3,5% hingga 2,1%, Asian Development Bank juga memproyeksi sebesar 2,5% dan Moody's sebesar 3%. Ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari pandemi Covid-19 masih diperparah pula dengan konflik perdagangan, investasi usaha yang melemah, dan ketidakpastian politik global. Konflik tarif dagang, terutama antara Amerika Serikat (AS) dan China, dinilai telah menekan perdagangan, merusak investasi usaha, dan membahayakan prospek lapangan pekerjaan secara global. Pelemahan ekonomi global ini akan berdampak pada perekonomian nasional melalui transmisi ekspor-impor. Hal ini akan berdampak pada pendapatan nasional dan industri dalam negeri.

Pada tahun 2021 ini juga dikhawatirkan terjadi *third-wave* COVID-19 yang berdampak terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga menghambat berjalannya aktivitas perekonomian yang berdampak pada tidak normalnya ekonomi. Dalam situasi tersebut langkah *preventif* menjadi cara paling strategis untuk menanggulangi sekaligus menekan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah pusat juga menggalakan kebijakan nasional untuk melaksanakan vaksinasi dengan target hingga tahun 2022 dan memastikan vaksinasi dapat memberikan efek

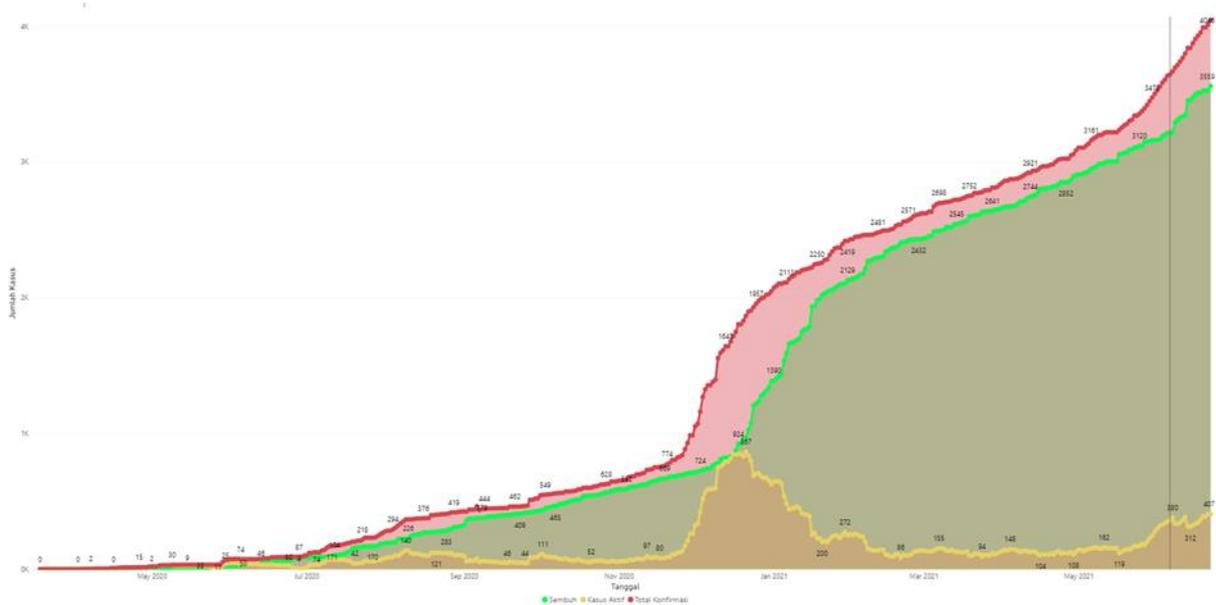
kekebalan terhadap antibodi agar masyarakat dapat menjalani aktivitas normal seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu kekhawatiran atas pandemi Covid-19 memberikan efek kepada *stakeholder* untuk memprediksi bahwa pencapaian target pembangunan akan sangat dinamis bahkan kemungkinan mengalami *shortfall* atau tercapai dibawah target yang diekspektasikan.



Gambar 3. 3 Perkembangan Kasus COVID-19 Nasional



Gambar 3. 4 Perkembangan Kasus COVID-19 Kalimantan Tengah



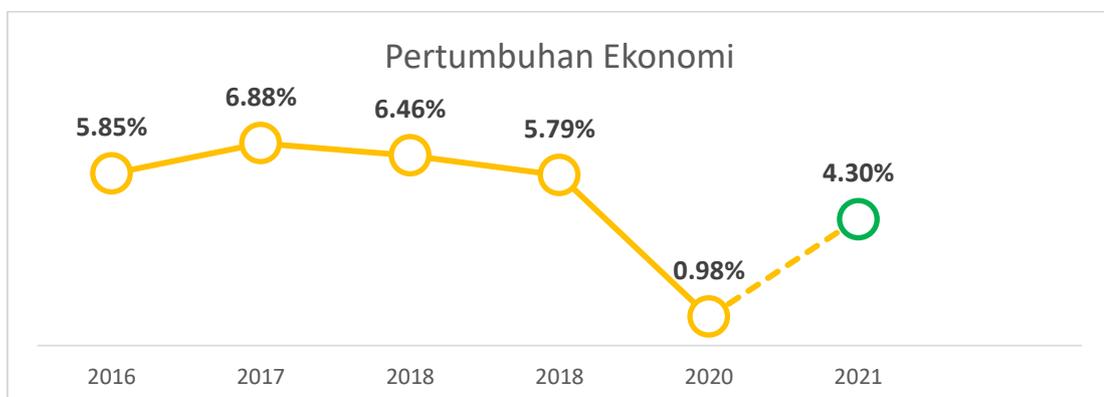
Gambar 3. 5 Perkembangan kasus COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat

Jika kita mencermati kondisi terkini pandemi Covid-19, kasus harian baik secara nasional maupun daerah cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pemerintah terus mengupayakan langkah penanganan dan pencegahan melalui sejumlah upaya, semisal mengaktifkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) baik di skala nasional, regional maupun mikro, serta melaksanakan program Vaksinasi Nasional. Vaksinasi yang dilaksanakan telah mencapai 72% dari target Februari (2,0 jt org) – per 23 Februari 2021. Saat ini vaksinasi terus digalakkan oleh pemerintah secara bertahap dan masif. Pemerintah telah memproyeksikan dan mempersiapkan kebutuhan dana untuk pengadaan vaksin mencapai Rp. 50 - 64 T dengan dikolaborasikan pendanaan dari daerah. Selain pendanaan, upaya

pengendalian dalam PPKM Mikro menjadi kunci keberhasilan dalam menekan dan mencegah meluasnya kasus Covid. Satgas Penanganan Covid-19 di daerah membentuk Posko Penanganan Covid-19 di setiap desa/kelurahan, dengan pelibatan aktif dari aparat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam Posko Penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan yang diupayakan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan pengendalian pertumbuhan ekonomi meyakinkan kita akan optimisme pemulihan ekonomi, utamanya di semester 2 di tahun 2021.

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, target PE Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2021 dipatok pada angka 7,63%. Namun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, regional serta lokal, maka target PE 2021 sebesar 7,63% diperkirakan sulit untuk tercapai. Perekonomian global, nasional dan lokal juga sempat terkoreksi tajam akibat dampak dari pandemik covid 19 yang melanda. Bahkan beberapa proyeksi lembaga ekonomi internasional seperti World Bank, IMF, dan ADB memproyeksi pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi meski dengan asumsi yang sangat ketat, yaitu pertumbuhan ekonomi global diproyeksi pada kisaran 4-5%.

Namun berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah bahwa LPE Provinsi Kalimantan Tengah di Triwulan I tahun 2021 mencapai 5,56%. Sementara Pencapaian LPE Nasional mencapai angka 7,07% selama triwulan II. Hal ini mengindikasikan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Secara umum, ada harapan kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir tahun 2021 mulai membaik dibandingkan kondisi 2020 (0,98%), namun diperkirakan kinerjanya belum dapat melampaui pencapaian LPE tahun 2019 (5,79%). Meski belum ada publikasi LPE Kabupaten Kotawaringin Barat di Triwulan I dan II tahun 2021, namun jika melihat pencapaian LPE Nasional maupun LPE Provinsi Kalteng, maka diperkirakan kondisinya tidak jauh berbeda. Kondisi PE Provinsi Kalteng dapat memberikan gambaran sementara terhadap perkembangan ekonomi Kotawaringin Barat, mengingat karakteristik sektor-sektor ekonomi di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tidak jauh berbeda. Dengan kondisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat diperkirakan mendekati proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada kisaran 4-5%, yakni pada angka 4,3%.



Gambar 3. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin barat 2016-2020 dan Target 2021

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Asumsi Perekonomian Nasional dan Regional serta melihat kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun ini serta mempertimbangkan tantangan dan proses PWK (Pembangunan Wilayah Kawasan). Agenda Prioritas Nasional yang ada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka beberapa arah kebijakan perekonomian yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat diproyeksi dapat tumbuh secara progresif dan diproyeksikan hingga digit 4,3% dan dapat diasumsikan bahwa tahun 2021 masih menjadi tahun transisi yang diharapkan kondisi perekonomian telah pulih dan bangkit dari dampak COVID-19. Tahun 2020 keuangan diarahkan untuk kebijakan penanganan dan penanggulangan COVID dan selanjutnya pada tahun 2021 merupakan tahun pemulihan kesehatan melalui kebijakan vaksinasi dan kelonggaran aktivitas perekonomian masyarakat.
2. Memanfaatkan momentum pembangunan Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 dimana Kabupaten Kotawaringin Barat masuk kedalam Major Proyek KI Surya Borneo dan KEK Batanjung.
3. Mengupayakan membangun kerjasama pemerintah dengan swasta serta kerjasama antar daerah untuk mengembangkan produk olahan serta hasil pertanian (industrialisasi, pertanian/agroindustri) dengan berbasis kawasan
4. Menjaga ketersediaan komoditas utama dan keterjangkauan harga di pasar, serta menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan non pangan;
5. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis pertanian.
6. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal, melalui program holistik untuk menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian pedesaan;
7. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan pelayanan bebas biaya bagi masyarakat untuk pelayanan wajib;
8. Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustri.
9. Mendorong pengembangan pariwisata berbasis konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan asumsi perekonomian daerah juga berdampak terhadap asumsi keuangan daerah. Guna percepatan pencapaian target pembangunan daerah, maka diperlukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi keuangan daerah, dengan menyusun kembali proporsi sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan sejumlah upaya refocusing anggaran, untuk menyesuaikan kemampuan pendanaan dari pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dengan menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan penyesuaian terhadap komponen pendapatan daerah, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan melalui pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Jatuhnya perekonomian global dan turunnya pertumbuhan ekonomi negara dipastikan berimbas pada kemungkinan penurunan APBN berdampak terhadap penganggaran di daerah. Defisit APBN akan berpengaruh terhadap besaran transfer keuangan dan dana desa ke daerah (TKDD), untuk menyesuaikan terhadap APBN. Dana Perimbangan khususnya DAU diperkirakan mengalami pertumbuhan antara 0% hingga 1%, sementara untuk DAK telah ditetapkan alokasinya berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan rencana kebutuhan daerah. Untuk DAK-Non Fisik Kementerian telah memberikan keleluasaan untuk memberikan insentif bagi daerah yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan mempersiapkan *Readiness of Criteria*.

a. Penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD)

Target PAD pada 2021 terkoreksi akibat pandemi Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak daerah dan

retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2021. Pada beberapa lapangan usaha yang terdampak Covid-19, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak mengurangi produksi sebagai respon dari berkurangnya permintaan (konsumsi) pasar. Menurunnya omzet usaha ini mengakibatkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan daerah dari sektor PAD. Selain pajak dan retribusi daerah, penerimaan pendapatan asli daerah juga didapat dari pembagian laba kepada pemerintah daerah yang bersumber dari laba penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PD BPR Marunting Sejahtera, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)

Penyesuaian pendapatan TKDD didasarkan atas rincian alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

c. Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditetapkan dengan memperhitungkan penerimaan bagi hasil pajak daerah provinsi dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan penyesuaian target PAD Provinsi Kalimantan Tengah dari menurunnya kegiatan perekonomian. Selain itu, terjadi penyesuaian pada Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa menyesuaikan alokasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya memulihkan target PAD ditempuh dengan mengawal target pajak dan retribusi daerah, difokuskan pada upaya
 - ✓ Melakukan intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah;
 - ✓ Menjaga ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;

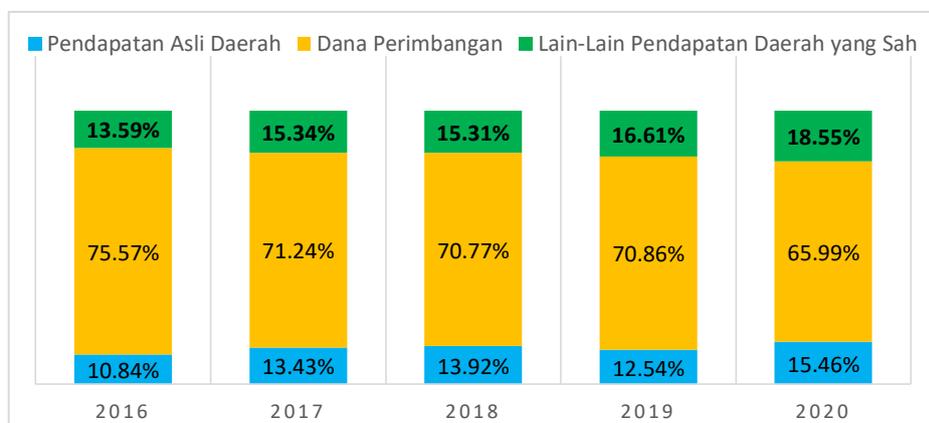
- ✓ Memberikan dispensasi kepada wajib pajak tertentu berupa penundaan kewajiban pembayaran pajak di luar waktu jatuh tempo;
 - ✓ Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - ✓ Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah;
 - ✓ Mengaktifkan kembali sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak tempat hiburan dan retribusi daerah, pariwisata dan lain-lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - ✓ Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah; Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.
 - ✓ Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - ✓ Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
2. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif;
 3. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016-2020, APBD 2021 beserta Proyeksi anggaran Pendapatan untuk perubahan RKPD 2021 :

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2020

No.	Uraian	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020 (AUDITED)	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN	1.322.594.838.557,43	1.317.262.615.496,67	1.291.455.997.165,63	1.357.377.149.401,90	1.449.011.596.895,94	2.45
1.1	Pendapatan Asli Daerah	143.330.741.728,12	176.855.124.641,39	179.785.920.666,73	170.185.830.808,34	224.651.929.841,28	12.93
1.1.1	Pajak daerah	33.359.659.422,17	48.280.750.268,53	61.675.813.242,39	51.527.738.156,10	64.838.822.752,80	20.60
1.1.2	Retribusi daerah	14.203.971.989,00	12.424.399.638,00	11.425.818.845,25	13.532.547.717,00	13.208.556.926,00	-1.13
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.050.925.491,34	8.110.575.146,38	9.017.096.032,00	8.941.166.757,00	9.804.364.851,00	8.75
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	88.716.184.825,61	108.039.399.588,48	97.667.192.547,09	96.184.378.178,24	136.800.185.311,48	13.15
1.2	Dana Perimbangan	999.504.184.473,00	938.379.875.488,00	913.940.904.918,00	961.791.162.166,00	958.924.263.043,00	-0.95
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	75.757.165.453,00	34.391.655.071,00	58.333.475.893,00	96.734.933.706,00	29.764.009.462,00	11.85
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	22.041.974.412,00	33.109.106.805,00	-	34.619.424.857,50	32
1.2.3	Dana alokasi umum	662.249.343.000,00	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	670.997.942.000,00	602.446.484.000,00	-2.21
1.2.4	Dana alokasi khusus	261.497.676.020,00	229.039.333.005,00	169.591.409.220,00	194.058.286.460,00	292.094.344.724,00	6.64
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	179.759.912.356,31	202.027.615.367,28	197.729.171.580,90	225.400.156.427,56	265.435.404.011,66	10.96
1.3.1	Hibah	4.983.000.000,00	3.588.000.000,00	32.623.510.509,71	37.062.444.744,34	37.161.976.183,59	201.55
1.3.2	Dana darurat	64.476.297.693,31					0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	58.634.768.000,00	68.899.707.882,28	78.916.717.559,19	81.343.170.283,22	64.243.460.228,07	3.52
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)		120.744.072.600,00	82.997.882.799,00	106.059.541.400,00	163.174.967.600,00	17%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			150.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00	120%
1.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				385.000.000,00		
1.3.7	Sumbangan Pihak Ketiga	15.316.777.122,00				455.000.000,00	2.45

Tabel diatas bahwa secara umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2016-2020 memiliki trend naik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,45% setiap tahunnya. Pertumbuhan rata-rata terbesar ditunjang oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup besar yaitu 12,93%. Sedangkan kontribusi Dana Perimbangan mengalami penurunan dengan persentase pertumbuhan -0,95%.



Gambar 3. 7
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan. Kemudian proporsi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan yang terakhir dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3. 5
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021

No.	Uraian	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	1.454.117.974.000,00	1,489,844,945,100.00	1,447,528,770,759.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	270.514.948.000	270,421,367,100.00	252,394,332,800.00
1.1.1.	Pajak daerah	82.650.000.000	90,200,000,000.00	79,450,000,000.00
1.1.2.	Retribusi daerah	31.355.225.300	31,355,225,300.00	23,847,977,900.00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	13.568.450.000	11,626,000,000.00	12,449,954,800.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	142.941.272.700	137,240,141,800.00	136,646,400,100.00
1.2	Dana Perimbangan	958.667.996.000	1,012,831,845,000.00	986,200,104,959.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil	71.276.575.000	72,512,251,020.00	75,694,740,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	642.759.248.000	612,889,225,000.00	593,260,006,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	244.632.173.000	327,430,368,980.00	317,245,358,959.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	224.935.030.000	206,591,733,000.00	208,934,333,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah		38,290,400,000.00	40,633,000,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		83,000,000,000.00	83,000,000,000.00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		85,301,333,000.00	85,301,333,000.00
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		-	-
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga		-	-

Sumber: Olah Data, 2021

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah sebagai upaya mengatasi dampak pasca pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Melalui realokasi dan *refocusing* serta penyesuaian belanja APBD pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya, sedikitnya 8% dari sumber dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH). Belanja yang mengalami penyesuaian dalam *refocusing* anggaran sebagai berikut:

- honorarium kegiatan, uang lembur, penyesuaian besaran belanja pegawai dari dana Kapitasi JKN dan dana BLUD.
- perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
- barang pakai habis untuk keperluan kantor.
- belanja cetak dan penggandaan.
- pakaian dinas dan atributnya.
- perawatan kendaraan bermotor.
- belanja sewa.
- Jasa pemeliharaan peralatan kantor.
- Jasa konsultasi.
- Tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- Makanan dan minuman rapat.
- Sosialisasi/workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan kelompok diskusi terfokus serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- Renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran.
- Pembangunan gedung baru.
- Pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan untuk ditunda.

Secara umum, kebijakan dalam mengalokasikan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 diarahkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk belanja fungsi pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yakni minimal 20% dari total belanja daerah;

2. Mengupayakan pemenuhan anggaran untuk belanja bidang kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, dengan alokasi 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Mengupayakan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021;
5. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja output kunci kegiatan pada program-program prioritas Tahun 2021 yang tertunda pelaksanaannya sebagai akibat realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dan recovery pandemi COVID-19 pada tahun 2021;
6. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas tahun 2021 yang mengarah pada penanganan dan pencegahan dampak pasca Covid-19, pembangunan SDM aparatur yang berkompetensi dan berkapasitas baik, akselerasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta pemulihan perekonomian daerah melalui pembinaan usaha masyarakat, penguatan ketahanan ekonomi, penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar;

Belanja untuk penanganan dan pencegahan dampak pasca Covid-19 dialokasikan sebagai berikut:

- Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berupa :
 - a. Dukungan operasional.
 - b. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Covid-19.
 - c. Distribusi, pengamanan dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin Covid-19 dan
 - d. Insentif tenaga kesehatan daerah.
 - Mendukung kelurahan untuk melaksanakan posko PPKM skala mikro
 - Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
7. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui pembenahan kelembagaan, tatalaksana dan SDM untuk mendukung terciptanya kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 8. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Mengalokasikan Belanja Pegawai maksimal 50% dari total belanja APBD, sebagai upaya mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
10. Meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya 29 % dari belanja Daerah, utamanya untuk pemenuhan belanja sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, seperti sanitasi, air bersih, akses antar wilayah untuk mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi.
11. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan IPM.
12. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun dana kelurahan;
13. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif.

Tabel 3. 6 Rata-Rata Belanja Daerah 2016-2020 Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp) (audited)	
2	BELANJA	1.280.948.775.316,64	1.231.224.927.010,35	1.218.497.879.562,74	1.404.058.598.095,32	1.442.474.017.840,80	3.80
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	614.487.165.510,00	571.736.983.219,00	590.939.316.914,00	644.394.394.955,00	658.037.465.082,36	1.87
2.1.1	Belanja Pegawai	466.082.652.719,00	402.416.578.934,00	434.299.535.589,00	475.078.140.623,00	441.025.705.448,00	-0.91
2.1.2	Belanja Bunga	858.680.569,00	-	-	280.000.007,00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi						-
2.1.3	Belanja Hibah	19,840,520,000.00	22,678,514,612.00	7,944,522,200.00	7,804,054,341.00	7,351,394,000.00	-14.56
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	354,550,000.00	1,517,250,000.00	1,630,250,000.00	1,161,500,000.00	3,093,000,000.00	118.23
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,980,543,000.00	6,859,967,500.00	8,174,154,300.00	6,423,330,300.00	7,740,424,700.00	66.15
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol	125,252,605,309.00	138,256,386,658.00	138,890,854,825.00	153,647,369,684.00	149,566,271,300.00	4.70
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	117,613,913.00	8,285,515.00	-	-	49,260,669,634.36	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	666.461.609.806,64	659.487.943.791,35	627.558.562.648,74	759.664.203.140,32	784.436.552.758,44	-
2.2.1	Belanja Pegawai	50.370.524.366,00	62.614.137.539,41	40.029.499.656,70	37.743.537.026,00		-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.452.739.255,56	250.271.504.108,94	315.608.818.338,24	349.856.181.230,80	407.431.358.282,67	-
2.2.3	Belanja Modal	382,638,346,185.08	403,321,116,578.55	340,758,782,140.12	357,837,690,237.29	377,005,194,475.77	-

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020 (Data Diolah)

Tabel 3. 7 Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021

No	Uraian	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	1.413.117.974.000	1,489,844,945,100.00	1,521,899,043,628.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	659.398.831.000	753,164,117,141.00	741,764,218,567.00
2.1.1	Belanja Pegawai	481.112.236.000	555,286,702,390.00	550,131,589,762.00
2.1.2	Belanja Bunga	1.800.000.000	1,800,000,000.00	847,000,000.00
2.1.3	Belanja Hibah	7.394.320.000	24,294,661,751.00	21,419,615,751.00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	455.000.000	1,222,500,000.00	1,485,000,000.00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.400.523.000	12,155,523,000.00	10,329,798,000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	153.236.752.000	154,404,730,000.00	152,441,809,000.00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4,000,000,000.00	5,109,406,054.00
2.2	Belanja Langsung	753.719.143.000	736,680,827,959.00	780,134,825,061.00

Sumber: Olah Data, 2021

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah bertujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA tahun 2021 diproyeksikan akan meningkat sebesar 16,04% dari tahun 2020, persentase ini sesuai dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan tahun 2016-2020.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki SiLPA dengan prosentase <7-8% dari total pendapatan yang dapat dikategorikan cukup ideal. SiLPA menjadi salah satu tolok ukur keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik, namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu dicermati penyebabnya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya. Sinergi proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, disertai dengan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan besaran SiLPA yang terbentuk akan sesuai dengan ketentuan yaitu dapat menutup defisit anggaran maksimal 6% dari total APBD.

Berdasarkan hasil pengalokasian belanja dan perkiraan pendapatan, diperlukan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. yang diarahkan berasal dari pinjaman daerah. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan provinsi perlu dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program yang selaras mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program yang dapat dikerjasamakan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.
4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyediakan daftar minat yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya.
5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dari lembaga donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui obligasi daerah dan lain-lain, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang bersifat *cost recovery*, artinya dengan beroperasinya fasilitas tersebut akan mendatangkan penghasilan yang dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun sekolah bertaraf internasional, jalan, JLS dan fasilitas infrastruktur lainnya.
7. *Redesign* skema BUMD menjadi lebih produktif melalui mekanisme BLUD dengan kepemilikan saham pemerintah daerah minimal 50%+1%. Serta berkaitan dengan penyertaan modal yang lebih efisien mengingat penerimaan kembali investasi non permanen memiliki *feedback* kurang dari 2%.

Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Daerah 2017-2020

NO.	URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020 (AUDITED)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN	58.658.971.965,00	89.741.036.754,00	124.698.255.080,19	93.826.890.811,61	90.993.771.371,23
3.1	Penerimaan Pembiayaan	99.156.971.965,00	99.733.036.754,00	135.768.255.080,19	120.826.890.811,61	95.493.771.371,23
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	99.100.732.450,00	100.305.035.205,00	115.622.448.060,19	120.684.471.011,61	59.479.771.371,23
3.1.2.	Pencairan Dana cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	20.000.000.000,00	-	36.000.000.000,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	93.950.000,00	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya	283.578.076,00	-	154.000.000,00	142.419.800,00	14.000.000,00
3.1.8.	Koreksi SILPA	-227.338.561,00	-665.948.451,00	-8.192.980,00	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	40.498.000.000,00	9.992.000.000,00	11.070.000.000,00	27.000.000.000,00	4.500.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.498.000.000,00	9.992.000.000,00	11.070.000.000,00	7.000.000.000,00	4.500.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	-	-	20.000.000.000,00	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 3.9 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah 2021

NO.	URAIAN	RKPD	APBD	Proyeksi Perubahan
		2021	2021	RKPD 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	SURPLUS/DEFISIT			-74,370,272,869.00
3	PEMBIAYAAN	-	41,000,000,000.00	89,531,350,426.37
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	20,000,000,000.00	130,531,350,426.37
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	-	21,000,000,000.00	97,531,350,426.37
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	33,000,000,000.00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	41.000.000.000	41,000,000,000.00	41,000,000,000.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
3.2.2	Badan usaha milik daerah (BUMD)	5.000.000.000	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	PT. Bank Kalteng		-	-
	PDAM Tirta Arut		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		36,000,000,000.00	36,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	36.000.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(41.000.000.000)	0.00	15,161,077,557.37

Sumber Data: Data Diolah, 2021

3.2.4. Kerangka Pendanaan Daerah

Untuk mendukung pembangunan daerah, telah disusun besaran alokasi belanja berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rencana Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN	SKPD	PAGU TOTAL PER URUSAN	% TERHADAP TOTAL BELANJA
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	312,364,380,122.00	20.52%
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD Sultan Imanudin	451,400,806,977.00	29.66%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225,301,166,584.00	14.80%
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,156,245,265.00	0.67%
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,747,197,075.00	1.76%
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	6,335,723,038.00	0.42%
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,783,612,041.00	0.45%
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5,395,619,740.00	0.35%
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	4,757,900,901.00	0.31%
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	52,465,000.00	0.00%
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	25,263,882,281.00	1.66%
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6,262,702,095.00	0.41%
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,665,629,256.00	0.44%
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3,088,384,638.00	0.20%
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	15,675,030,804.00	1.03%
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8,893,357,905.00	0.58%

NO	URUSAN	SKPD	PAGU TOTAL PER URUSAN	% TERHADAP TOTAL BELANJA
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,787,365,642.00	0.51%
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,113,686,488.00	0.34%
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6,925,906,433.00	0.46%
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16,500,000.00	0.00%
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30,000,000.00	0.00%
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,696,895,391.00	0.18%
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,280,603,889.00	0.35%
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72,876,917.00	0.00%
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	13,912,486,946.00	0.91%
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata	5,774,304,207.00	0.38%
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	28,701,295,716.00	1.89%
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,597,924,251.00	0.24%
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	354,735,000.00	0.02%
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	352,617,600.00	0.02%
31	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	44,981,278,958.00	2.96%
32	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	27,497,532,058.00	1.81%
33	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,274,997,333.00	0.48%
34	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah	186,503,324,172.00	12.25%
35	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5,726,964,410.00	0.38%
36	Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1,582,214,136.00	0.10%

NO	URUSAN	SKPD	PAGU TOTAL PER URUSAN	% TERHADAP TOTAL BELANJA
37	Penelitian Dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	708,132,600.00	0.05%
38	Inspektorat Daerah	Inspektorat	9,939,749,783.00	0.65%
39	Kewilayahan	Kecamatan	35,955,212,835.00	2.36%
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,968,335,141.00	0.39%
			1,521,899,043,628.00	100.00%



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2021 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang pada tahun 2021 memprioritaskan pada 7 program nasional yaitu:
 - 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
 - 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - 3) SDM berkualitas dan berdaya saing
 - 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
 - 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - 7) Stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik.
 - b. Korelasi terhadap Program Prioritas Provinsi (Kalteng Berkah), tahun 2021 mengarah pada tema “Pengembangan Agro Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan”, dengan prioritas:
 - 1) Pemerataan Infrastruktur wilayah
 - 2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan , pesisir dan pantai
 - 3) Stabilitas ekonomi daerah
 - 4) Peningkatan pendapatan masyarakat

- 5) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- 6) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- 7) Pengelolaan industri pariwisata
- 8) Pengelolaan SDA Secara bijaksana yang berkelanjutan
- 9) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
- c. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- d. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- e. Korelasi terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi perangkat daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, perangkat daerah (PD) pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan factor strategis dan potensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR

K : KETAKWAAN

H : HARMONIS

L : LANGGENG

A : AMAN

S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu :

N : NASIONALIS

U : UNGGUL

R : RELIGIUS

A : AMANAH

N : NYATA

I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Penjabaran Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI	
"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

Sumber : RPJMD 2017-2022

Adapun misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai penjabaran dari Visi **"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"** adalah sebagai berikut :

Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.

Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

4.2. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) **Tingginya Angka Kemiskinan.**

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan. Isu kemiskinan menjadi perhatian penting untuk segera mungkin ditanggulangi. Hal tersebut dikarenakan karena faktor kemiskinan jika dibiarkan dapat dapat menyebabkan permasalahan lainnya. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, isu kemiskinan menjadi isu yang sangat serius untuk diselesaikan karena angka kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi.

2) **Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.**

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan *e-government* masih terbatas serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

3) **Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.**

Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi fokus pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD dikarenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga ADD dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

4) **Minimnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.**

Selain akses terhadap pendidikan, kelayakan sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi saat ini, masih terdapat saranaprasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP.

5) **Kurangnya Minat Baca Masyarakat.**

Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Minat baca juga digunakan sebagai salah satu poin penilaian kualitas sumberdaya manusia. Jika dilihat dari tingkat kunjungan perpustakaan, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

6) **Kurangnya Akses Dan Kualitas Terhadap Layanan Kesehatan.**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari nilai angka harapan hidup. AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Hal tersebut menunjukkan masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki akses rendah terhadap layanan kesehatan yang memadai. Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

7) **Belum Optimalnya Pengelolaan Sarana-Prasarana Olahraga.**

Salah satu upaya pengembangan bakat pemuda adalah melalui olahraga. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan sarana-prasarana yang layak pakai. Kondisi saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olahraga belum optimal.

8) Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri.

Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan. Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya rencana induk pembangunan industri kabupaten. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industri khususnya sektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industri hilir.

9) Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa.

Kondusifitas aktifitas perdagangan barang dan jasa masih rendah, salah satu penyebabnya adalah peran daerah dalam melakukan perlindungan dunia usaha yang masih belum optimal. Hal tersebut berdampak pada tingginya fluktuasi harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang masih belum optimal juga semakin menurunkan kondusifitas aktifitas perdagangan khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil.

10) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah.

11) Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah.

Ketahanan pangan yang masih rendah tercermin dari tingkat konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan, serta rendahnya keragaman pangan masyarakat (Pola Harapan Pangan) yang masih rendah.

12) Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat (Koperasi dan UMKM).

Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM.

13) Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD.

Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehingga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi. Selain itu penggalan PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

14) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi.

Meskipun seluruh desa/kelurahan telah terhubung dengan akses jalan darat (kecuali Teluk Pulai dan Sungai Cabang), masih terdapat sejumlah permasalahan infrastruktur baik di persedaan maupun di perkotaan, misalnya drainase yang tidak tertata, sanitasi

buruk, terdapat kawasan kumuh di perkotaan, serta belum adanya angkutan penumpang dalam kota. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

15) Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat dinilai belum optimal, dimana masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium lahan gambut,serta diperparah dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam.

16) Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir.

Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum optimal.

17) Masih Tingginya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

18) Lemahnya *Branding* Wisata Kotawaringin Barat.

Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui penguatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Saat ini positioning branding pariwisata daerah masih belum optimal. Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini masih belum ada sistem yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

19) Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service* Destinasi Wisata.

Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah Aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service* Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal. Dari segi kesadaran masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

4.2.2. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dari sebuah proses pembangunan. Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis
5. Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan
6. Peningkatan Pariwisata Daerah

4.2.3. Sasaran

Sasaran merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran ini ditentukan untuk menjawab isu strategis daerah. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
2. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
4. Meningkatnya pelayanan publik.
5. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga.
8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Sekunder Unggulan.
9. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
10. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.
11. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar.
12. Meningkatnya kesejahteraan PMKS.
13. Menurunnya tingkat pengangguran.
14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
15. Menurunnya resiko bencana.
16. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.
17. Meningkatnya Desa Mandiri.
18. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas kota/kabupaten layak anak.
19. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.
20. Meningkatkan industri kepariwisataan.
21. Meningkatnya kelestarian seni dan budaya.

4.3. Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan kondisi eksisting daerah melalui isu strategis, tujuan yang ingin dicapai serta sasaran yang dilakukan, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 diarahkan untuk :

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
Percepatan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan penyediaan infrastruktur diutamakan pada infrastruktur dasar berupa prasarana untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelistrikan dan lahan pertanian. Selain membuka keterisolasian wilayah, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal pemerintah daerah akan meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.
2. Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;
3. Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (pengembangan aspek hilir produk pertanian) dan perdagangan sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;
Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pemerintah akan mendorong pengembangan hilirisasi melalui diversifikasi produk. Sementara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, dilakukan standardisasi produk dan proses produksi.
4. Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing;
Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi : agribisnis (CPO, kerupuk amplang, daging sapi), industri manufaktur dan pariwisata (ekowisata, agrowisata dan wisata budaya).
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Investasi di daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang bermuara pada meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dilakukan upaya pengendalian komoditas pemicu inflasi, seperti: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan air tawar, beras yang sebenarnya telah dapat diproduksi di tingkat lokal meskipun dengan skala yang terbatas. Pengendalian komoditas lokal dan yang berasal dari luar daerah dilakukan meliputi proses produksi, produktifitas dan pendistribusiannya. Selain itu pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal, dengan dukungan strategi lainnya, seperti strategi pengembangan kawasan dan demplot komoditas pemicu inflasi, pembinaan UMKM, mempermudah akses permodalan dan jaringan pemasaran.

Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan multiplier effect terhadap pendapatan masyarakat.

6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil untuk dapat mengisi bursa tenaga kerja pada perusahaan ataupun wirausaha yang berujung pada menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Daerah.

4.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

4.4.1. Tema Pembangunan

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka tema pembangunan daerah tahun 2021 adalah “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah”.

4.4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tema, pembangunan daerah tahun 2021 adalah “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah”. Strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas

pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan. Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas I** : **Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan.**
2. **Prioritas II** : **Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan.**
3. **Prioritas III** : **Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi.**
4. **Prioritas IV** : **Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**
5. **Prioritas V** : **Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.**

4.4.3. Program Prioritas

Berdasarkan tema serta prioritas pembangunan daerah, maka program yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1	Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5. Program Promosi Penanaman Modal 6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 12. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 13. Program Penyuluhan Pertanian 14. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2	Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan.	16. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 17. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 18. Program Pemberdayaan Sosial 19. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 20. Program Penempatan Tenaga Kerja 21. Program Hubungan Industrial 22. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 23. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 24. Program Penanganan Kerawanan Pangan 25. Program Pengawasan Keamanan Pangan 26. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 27. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 28. Program Penatagunaan Tanah 29. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 30. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 31. Program Pengendalian Penduduk 32. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 33. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		34. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 35. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 36. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 37. Program Pengembangan UMKM 38. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 39. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 40. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 41. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 42. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 43. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 44. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3	Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi.	45. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”	46. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 47. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 48. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 49. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 50. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 51. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 52. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 53. Program Pengembangan Permukiman 54. Program Penataan Bangunan Gedung 55. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 56. Program Penyelenggaraan Jalan 57. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 58. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 59. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 60. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 61. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 62. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 63. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 64. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 65. Program Pengelolaan Persampahan 66. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 67. Program Pengelolaan Pelayaran 68. Program Pelayanan Penanaman Modal 69. Program Pengembangan Kebudayaan 70. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 71. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 72. Program Pemasaran Pariwisata 73. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 74. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 75. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 76. Program Pengembangan Ekspor 77. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 78. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 79. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 80. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 81. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 82. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 83. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 84. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 85. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
5	Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing	86. Program Pengembangan Perumahan 87. Program Kawasan Permukiman 88. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 89. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 90. Program Penanggulangan Bencana 91. Program Penanggulangan Kebakaran 92. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 93. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 94. Program Rehabilitasi Sosial 95. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 96. Program Penanganan Bencana 97. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 98. Program Perlindungan Perempuan 99. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 100. Program Perlindungan Khusus Anak 101. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 102. Program Pendaftaran Penduduk 103. Program Pencatatan Sipil 104. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 105. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 106. Program Peningkatan Kerjasama Desa 107. Program Administrasi Pemerintahan Desa 108. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 109. Program Aplikasi Informatika 110. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 111. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 112. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 113. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 114. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 115. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 116. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 117. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 118. Program Pembinaan Perpustakaan 119. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 120. Program Pengelolaan Arsip 121. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 122. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 123. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 124. Program Perekonomian Dan Pembangunan 125. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 126. Program Kepegawaian Daerah 127. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 128. Program Penyelenggaraan Pengawasan 129. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 130. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 131. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 132. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 133. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 134. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 135. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 136. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : RPJMD 2017-2022

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan analisis kebutuhan belanja, dilakukan pergeseran alokasi pendanaan terhadap belanja program. Pergeseran belanja berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Pergeseran Alokasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
1	Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan	4	4	4	55	57	59	96,050,060,900.00	96,562,040,702.00	97,474,303,112.00	1,424,242,212.00
2		Program Pengembangan Kurikulum	2	2	2	2	2	2	170,000,000.00	169,999,090.00		(170,000,000.00)
3		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	1	1	2	2	2	5,580,535,000.00	5,486,723,270.00	5,143,522,985.00	(437,012,015.00)
4		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	2	2	3	3	3	50,000,000.00	49,999,950.00	38,665,350.00	(11,334,650.00)
5		Program Promosi Penanaman Modal	1	1	1	2	2	2	220,657,270.00	218,333,910.00	101,743,550.00	(118,913,720.00)
6		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2	2	2	4	4	4	5,765,953,500.00	5,838,427,061.00	5,863,015,242.00	97,061,742.00
7		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	2	2	6	6	6	2,350,903,250.00	1,876,371,691.00	2,291,813,917.00	(59,089,333.00)
8		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	3	3	4	4	4	915,467,000.00	1,402,772,361.00	1,457,492,205.00	542,025,205.00
9		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5	5	5	8	8	8	7,262,132,200.00	6,225,065,098.00	4,368,914,283.00	(2,893,217,917.00)
10		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	3	3	7	7	7	1,609,176,000.00	1,746,160,482.00	1,650,068,199.00	40,892,199.00
11		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	4	4	6	6	6	553,337,600.00	704,373,557.00	678,833,535.00	125,495,935.00
12		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	1	1	3	3	3	254,525,000.00	228,257,500.00	168,257,500.00	(86,267,500.00)
13		Program Penyuluhan Pertanian	1	1	1	4	4	4	607,552,500.00	681,676,890.00	476,998,140.00	(130,554,360.00)
14		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam	1	1	1	1	1	1	350,000,000.00	349,984,000.00		(350,000,000.00)

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
		Negeri										
15		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	1	1	4	4	4	1,485,572,000.00	938,763,941.00	312,430,000.00	(1,173,142,000.00)
Jumlah			33	33	33	111	113	115	123,225,872,220.00	122,478,949,503.00	120,026,058,018.00	(3,199,814,202.00)
16	Membangun Industrial	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	3	3	3	3	3	339,999,700.00	313,032,230.00	517,496,068.00	177,496,368.00
17	Matching Antar Pelaku Industrial	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2	2	2	9	9	9	2,743,230,300.00	2,155,737,510.00	1,831,871,600.00	(911,358,700.00)
18	Terhadap	Program Pemberdayaan Sosial	1	1	1	3	3	3	196,101,113.00	196,100,240.00	123,720,580.00	(72,380,533.00)
19	Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1	1	3	3	3	961,136,960.00	668,618,040.00	591,710,040.00	(369,426,920.00)
20		Program Penempatan Tenaga Kerja	3	3	3	3	3	3	457,000,000.00	418,566,460.00	391,021,260.00	(65,978,740.00)
21		Program Hubungan Industrial	2	2	2	4	4	4	118,600,000.00	181,014,900.00	126,808,500.00	8,208,500.00
22		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2	2	2	2	2	2	152,700,000.00	193,019,090.00	150,705,336.00	(1,994,664.00)
23		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	3	3	6	6	6	522,807,900.00	1,035,448,223.00	689,401,652.00	166,593,752.00
24		Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	1	1	1	1	1	35,977,800.00	32,617,550.00	11,236,650.00	(24,741,150.00)
25		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	1	1	2	2	2	72,385,600.00	58,937,037.00	28,712,937.00	(43,672,663.00)
26		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	1	1	1	1	1	49,872,900.00	36,682,750.00	20,110,000.00	(29,762,900.00)
27		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	1	1	1	1	1	54,193,000.00	42,772,700.00	15,300,000.00	(38,893,000.00)
28		Program Penatagunaan Tanah	1	1	1	2	2	2	42,181,000.00	38,480,900.00	17,055,000.00	(25,126,000.00)
29		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin			1			1			9,855,000.00	9,855,000.00

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
		Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
30		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	1	4	4	4	1,276,445,950.00	1,224,196,195.00	616,739,956.00	(659,705,994.00)
31		Program Pengendalian Penduduk	2	2	2	2	2	2	462,883,200.00	219,930,018.00	123,183,648.00	(339,699,552.00)
32		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4	4	4	7	7	12	2,516,654,000.00	2,754,121,704.00	2,869,500,990.00	352,846,990.00
33		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	2	2	2	2	3	382,497,000.00	111,413,307.00	95,700,000.00	(286,797,000.00)
34		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1	1	1	1	1	1	64,400,000.00	45,590,000.00	45,590,000.00	(18,810,000.00)
35		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1	1	1	1	1	1	305,162,500.00	214,432,270.00	21,100,000.00	(284,062,500.00)
36		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1	1	1	1	1	1	194,000,000.00	123,831,597.00	123,831,597.00	(70,168,403.00)
37		Program Pengembangan UMKM	1	1	1	1	1	1	520,942,000.00	512,764,650.00	11,000,000.00	(509,942,000.00)
38		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	1	1	2	3	3	92,479,050.00	394,619,925.00	351,179,850.00	258,700,800.00
39		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	1	1	35,000,000.00			(35,000,000.00)
40		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2	2	2	5	5	5	704,250,000.00	336,614,672.00	254,681,200.00	(449,568,800.00)

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPd Murni ke Perubahan RKPd (-/+)
			RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan	RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan	RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan	
41		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	1	1	2	2	2	99,947,500.00	94,085,600.00	164,054,600.00	64,107,100.00
42		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	2	2	4	4	4	11,619,656,010.00	6,872,107,411.00	5,743,603,889.00	(5,876,052,121.00)
43		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	1	2	1	1	3	4,000,000.00		1,260,800,000.00	1,256,800,000.00
44		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	1	2	2	2	71,000,000.00	63,209,010.00	15,137,200.00	(55,862,800.00)
Jumlah			44	44	46	76	77	86	24,095,503,483.00	18,337,943,989.00	16,221,107,553.00	(7,874,395,930.00)
45	Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	1	1	14	14	14	2,128,491,250.00	2,117,113,534.00	1,751,070,289.00	(377,420,961.00)
Jumlah			1	1	1	14	14	14	2,128,491,250.00	2,117,113,534.00	1,751,070,289.00	(377,420,961.00)
46	Peningkatan Infrastruktur Industri dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	4	4	47	47	54	148,200,439,285.00	186,087,965,503.00	189,683,129,131.00	41,482,689,846.00
47	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	3	3	4	4	4	10,476,128,900.00	10,670,947,075.00	28,808,269,021.00	18,332,140,121.00
48		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2	3	3	3	4	4	53,000,000.00	128,217,037.00	251,712,367.00	198,712,367.00
49		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2	2	2	8	8	8	11,860,887,000.00	15,995,288,000.00	15,915,474,100.00	4,054,587,100.00
50		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	1	1	2	2	2	3,400,000,000.00	4,973,014,000.00	4,977,591,000.00	1,577,591,000.00
51		Program Pengelolaan Dan	1	1	1	2	2	2				

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKP (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
		Pengembangan Sistem Air Limbah							4,090,058,000.00	3,765,075,000.00	3,767,274,300.00	(322,783,700.00)
52		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	1	1	2	2	2	5,646,160,000.00	7,683,340,000.00	7,639,200,000.00	1,993,040,000.00
53		Program Pengembangan Permukiman	1	1	1	2	2	2	15,724,102,000.00	20,722,428,254.00	20,736,163,554.00	5,012,061,554.00
54		Program Penataan Bangunan Gedung	1	1	1	2	2	2	23,918,420,606.08	38,220,660,407.00	37,957,156,589.00	14,038,735,982.92
55		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1	1	1	1	1	1	123,683,000.00	472,398,370.00	432,400,000.00	308,717,000.00
56		Program Penyelenggaraan Jalan	1	1	1	6	6	6	101,699,608,022.92	118,229,723,519.00	117,375,977,147.00	15,676,369,124.08
57		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	3	3	4	4	4	921,942,400.00	676,074,153.00	531,074,042.00	(390,868,358.00)
58		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	3	3	3	3	3	1,326,771,240.00	5,426,159,000.00	4,455,697,100.00	3,128,925,860.00
59		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	1	1	2	2	2	57,900,000.00	46,121,750.00	19,855,000.00	(38,045,000.00)
60		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	40,300,000.00	59,635,200.00	48,315,550.00	8,015,550.00
61		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	2	2	3	3	3	365,450,000.00	297,131,330.00	230,882,635.00	(134,567,365.00)
62		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	1	1	1	1	2	2,088,736,000.00	1,833,152,380.00	2,410,588,180.00	321,852,180.00
63		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		1	1		1	2			10,020,000.00	10,020,000.00
64		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	39,000,000.00	44,200,000.00	49,640,000.00	10,640,000.00

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKP (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
65		Program Pengelolaan Persampahan	1	1	1	3	3	3	9,759,050,000.00	15,041,432,658.00	17,310,384,513.00	7,551,334,513.00
66		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5	5	6	11	11	12	4,548,448,000.00	4,265,789,888.00	3,101,194,417.00	(1,447,253,583.00)
67		Program Pengelolaan Pelayaran	1	1	1	1	1	1	5,026,800,000.00	7,052,170,000.00	7,041,400,000.00	2,014,600,000.00
68		Program Pelayanan Penanaman Modal	1	1	1	3	3	3	117,522,000.00	115,660,450.00	103,052,000.00	(14,470,000.00)
69		Program Pengembangan Kebudayaan	2	2	2	5	5	5	2,043,034,000.00	1,902,947,781.00	1,584,724,741.00	(458,309,259.00)
70		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	1	1	1	1	1	625,000,000.00	1,120,670,650.00	1,112,170,650.00	487,170,650.00
71		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	1	1	3	3	3	1,255,749,600.00	1,242,270,916.00	923,148,932.00	(332,600,668.00)
72		Program Pemasaran Pariwisata	1	1	1	3	3	3	294,488,375.00	285,006,180.00	204,789,050.00	(89,699,325.00)
73		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1	1	1	1	1	1	17,884,800.00	12,405,000.00	7,905,000.00	(9,979,800.00)
74		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2	2	2	4	4	4	3,542,342,000.00	3,280,171,549.00	3,243,894,551.00	(298,447,449.00)
75		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2	2	2	3	3	3	203,484,000.00	195,630,100.00	182,070,100.00	(21,413,900.00)
76		Program Pengembangan Ekspor	1	1	1	2	2	2	100,000,000.00	93,969,000.00		(100,000,000.00)
77		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	15,000,000.00	12,555,000.00	12,555,000.00	(2,445,000.00)
78		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	25,300,000.00	9,210,000.00	9,210,000.00	(16,090,000.00)
79		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	261,354,920.00	334,197,600.00	334,197,600.00	72,842,680.00
80		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	25,300,000.00	9,210,000.00	9,210,000.00	(16,090,000.00)

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKP (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
81		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	3	3	9	9	9	1,481,269,050.00	1,274,201,500.00	795,301,400.00	(685,967,650.00)
82		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	24	24	24	1,059,909,750.00	865,640,400.00	548,202,650.00	(511,707,100.00)
83		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	5	5	28	28	29	171,795,210,000.00	174,426,360,750.00	171,064,945,734.00	(730,264,266.00)
84		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	12	12	12	846,488,000.00	932,360,200.00	763,436,960.00	(83,051,040.00)
85		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3	3	3	4	4	4	774,992,000.00	747,412,600.00	708,132,600.00	(66,859,400.00)
Jumlah			68	70	71	215	217	228	533,851,212,949.00	628,550,803,200.00	644,360,345,614.00	110,509,132,665.00
86	Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing	Program Pengembangan Perumahan	1	1	3	1	1	3	10,220,000.00	10,220,000.00	917,010,714.00	906,790,714.00
87		Program Kawasan Permukiman	2	2	2	4	4	4	1,312,617,000.00	294,431,000.00	23,255,000.00	(1,289,362,000.00)
88		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	1	1	1	1	1	1,395,575,200.00	1,379,270,950.00	1,392,488,300.00	(3,086,900.00)
89		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1	1	1	3	3	3	3,766,589,200.00	4,261,397,462.00	4,209,800,500.00	443,211,300.00
90		Program Penanggulangan Bencana	4	4	4	12	13	15	3,339,476,000.00	2,718,986,560.00	6,499,992,482.00	3,160,516,482.00
91		Program Penanggulangan Kebakaran	1	1	1	1	1	1				-
92		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3	3	3	4	4	7	1,774,397,000.00	1,347,696,760.00	4,968,147,056.00	3,193,750,056.00
93		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	1	1	1	1	1	75,000,000.00	74,999,990.00	74,606,850.00	(393,150.00)
94		Program Rehabilitasi Sosial	2	2	2	4	4	4	546,000,000.00	539,029,150.00	392,264,650.00	(153,735,350.00)
95		Program Perlindungan Dan	2	2	2	3	3	3				

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
		Jaminan Sosial							538,735,113.00	524,540,650.00	408,800,350.00	(129,934,763.00)
96		Program Penanganan Bencana	2	2	2	2	2	3	623,701,113.00	169,046,000.00	423,994,200.00	(199,706,913.00)
97		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	1	1	2	2	2	1,000,000,000.00	947,883,060.00	377,985,000.00	(622,015,000.00)
98		Program Perlindungan Perempuan	1	1	1	1	1	1	40,000,000.00	34,808,418.00	19,637,350.00	(20,362,650.00)
99		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	1	1	3	3	3	70,417,000.00	76,245,910.00	74,493,460.00	4,076,460.00
100		Program Perlindungan Khusus Anak	1	1	1	2	2	2	63,305,000.00	96,310,240.00	96,310,240.00	33,005,240.00
101		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			1			1			11,000,000.00	11,000,000.00
102		Program Pendaftaran Penduduk	2	2	2	3	3	3	192,186,000.00	172,722,738.00	165,795,788.00	(26,390,212.00)
103		Program Pencatatan Sipil	1	1	1	1	1	1	40,000,000.00	42,410,000.00	42,410,000.00	2,410,000.00
104		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	2	2	3	3	3	130,550,000.00	158,507,925.00	46,592,550.00	(83,957,450.00)
105		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1	1	1	1	1	29,250,000.00	648,467,595.00	435,102,440.00	405,852,440.00
106		Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	1	1	3	3	3	196,465,550.00	163,184,824.00	103,499,634.00	(92,965,916.00)
107		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	1	6	6	6	1,188,674,950.00	2,006,880,531.00	1,341,458,784.00	152,783,834.00
108		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1	1	1	4	4	4	861,300,000.00	867,662,451.00	1,449,325,000.00	588,025,000.00
109		Program Aplikasi Informatika	2	2	2	5	5	5	3,275,950,000.00	3,224,450,000.00	2,501,770,000.00	(774,180,000.00)
110		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1	1	2	1	1	2	137,682,000.00	69,005,220.00	390,304,000.00	252,622,000.00
111		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	1	1	1	1	8,505,100.00	8,505,050.00	7,124,250.00	(1,380,850.00)

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
112		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	2	2	4	4	4	631,051,472.00	620,261,190.00	387,228,285.00	(243,823,187.00)
113		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4	4	4	4	4	4	1,502,892,832.00	3,257,022,080.00	1,466,252,877.00	(36,639,955.00)
114		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	1	1	1	1	1	382,102,944.00	319,401,620.00	117,566,800.00	(264,536,144.00)
115		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	1	1	1	1	31,887,400.00	32,150,000.00	16,500,000.00	(15,387,400.00)
116		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1	1	1	1	1	1	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-
117		Program Pembinaan Perpustakaan	2	2	2	5	5	5	369,960,000.00	701,899,283.00	655,485,142.00	285,525,142.00
118		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1	1	1	1	1	1	15,040,000.00	15,039,750.00	8,493,250.00	(6,546,750.00)
119		Program Pengelolaan Arsip	3	3	3	3	3	3	38,139,900.00	44,939,365.00	6,110,883.00	(32,029,017.00)
120		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1	1	1	1	1	1	78,409,000.00	71,800,000.00	66,766,034.00	(11,642,966.00)
121		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	1	1	1	1	1	34,000,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	(4,250,000.00)
122		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4	4	4	10	10	10	9,270,133,250.00	11,134,026,400.00	8,012,793,498.00	(1,257,339,752.00)
123		Program Perekonomian Dan Pembangunan	4	4	4	9	9	9	890,633,600.00	845,110,450.00	640,460,950.00	(250,172,650.00)
124		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	5	5	5	15	18	18	3,332,106,000.00	5,690,937,435.00	4,955,803,395.00	1,623,697,395.00
125		Program Kepegawaian Daerah	4	4	4	13	13	13	1,556,983,900.00	1,567,709,204.00	1,165,217,481.00	(391,766,419.00)
126		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	2	2	3,443,380,000.00	3,426,026,900.00	1,582,214,136.00	(1,861,165,864.00)
127		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	2	2	8	8	8	2,288,266,000.00	2,586,490,920.00	2,237,787,950.00	(50,478,050.00)

No	Prioritas	Program	Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah pagu			Perubahan pagu dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD (-/+)
			RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	
128		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2	2	2	4	4	4	792,897,000.00	790,225,238.00	676,579,078.00	(116,317,922.00)
129		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2	2	3	3	3	4	317,607,000.00	350,314,765.00	305,516,750.00	(12,090,250.00)
130		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	1	1	1	1	1	5,250,000.00	2,640,500.00		(5,250,000.00)
131		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	1	11	11	11	787,129,300.00	908,636,915.00	535,737,894.00	(251,391,406.00)
132		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	1	1	2	2	2	295,500,000.00	562,436,200.00	394,234,580.00	98,734,580.00
133		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	1	1	3	3	3	1,371,641,000.00	1,359,327,890.00	1,331,894,810.00	(39,746,190.00)
134		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	1	1	3	3	3	282,600,000.00	276,036,000.00	300,160,550.00	17,560,550.00
135		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16	16	16	83	84	85	681,452,687,274.00	663,901,290,285.00	688,244,739,213.00	6,792,051,939.00
Jumlah			100	100	105	261	266	278	729,816,894,098.00	718,360,134,874.00	739,540,462,154.00	9,723,568,056.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya pergeseran alokasi pendanaan dari satu prioritas ke prioritas pembangunan yang lain. Pengurangan alokasi terbesar ada pada prioritas kedua yakni **Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan**, alokasi anggaran berkurang Rp.7,874,395,930.00 dari Rp.24,095,503,483.00 menjadi Rp.16,221,107,553.00. Diikuti oleh prioritas pertama, **Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan** terjadi pengurangan alokasi sebesar Rp.3,199,814,202.00 dari alokasi awal di RKPD Murni Rp.123,225,872,220.00 menjadi Rp.120,026,058,018.00, dan prioritas ketiga, **Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi** terjadi pengurangan alokasi pagu sebesar Rp.377,420,961.00 dari alokasi awal dalam RKPD Murni sebesar Rp.2,128,491,250.00 menjadi Rp.1,751,070,289.00. Sementara penambahan alokasi pagu terbesar terdapat pada prioritas keempat, **Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, alokasi pagu bertambah sebesar Rp.110,509,132,665.00 dari alokasi awal sebesar Rp.533,851,212,949.00 menjadi Rp.533,851,212,949.00, diikuti prioritas kelima, **Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing** terjadi penambahan alokasi sebesar Rp.9,723,568,056.00 dari alokasi awal sebesar Rp.729,816,894,098.00 menjadi Rp.739,540,462,154.00.

4.4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021

Pembangunan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2021

Nasional	Daerah	Provinsi
Tema : Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Tema : Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah	Tema : Pengembangan Agro Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Prioritas Pembangunan:		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi	Pengelolaan Industri Pariwisata Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Peningkatan Pendapatan Masyarakat Stabilitas Ekonomi Daerah
	Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun Industrial Maching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai

Sumber : RKP Nasional 2021, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah, RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022

4.5. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Beberapa isu strategis daerah juga menjadi isu strategis di tingkat pusat, sehingga merupakan permasalahan penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerlukan perhatian dalam penanganannya. Beberapa program yang dijalankan oleh beberapa SKPD sebagai langkah penanganan permasalahan pembangunan diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun), Stunting dan Kemiskinan.

Tabel 4.5

Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun), Stunting dan Kemiskinan

Permasalahan	Program	SKPD
STUNTING	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas TPHP Dan Dinas PKH
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perkim
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
KEMISKINAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RSUD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas TPHP Dan Dinas PKH
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Pengelolaan Persampahan	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	

2. Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil

Tabel 4.6
Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil

Permasalahan	Program	SKPD
Optimalisasi DBH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM

Upaya pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan dan UMKM merupakan salah satu langkah pemulihan dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi riil. Upaya-upaya dalam mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan ketahanan pangan dan pembinaan UMKM akan dilaksanakan melalui nomenklatur program sebagai berikut:

Tabel 4.7
Inovasi Program Permasalahan Optimalisasi Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM

Permasalahan	Program	SKPD
Optimalisasi Ekonomi kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindagkop UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	

4. Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi)

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, dilakukan juga upaya perbaikan derajat kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar lingkungan untuk mendukung hidup bersih dan sehat, seperti sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Upaya-upaya tersebut akan dilaksanakan melalui nomenklatur program sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi)

Permasalahan	Program	SKPD
Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim

4.6. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, setiap tahunnya berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Berbagai inovasi telah dimulai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2020. Beberapa inovasi yang masih dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diinventarisir di Aplikasi Sistem Indeks Inovasi Daerah (SIID) sebagai dasar pengukuran Indeks Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menyesuaikan tema baru Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam menyikapi bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka inovasi yang ditampilkan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah inovasi yang menunjang pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, inovasi yang terpilih adalah sebagai berikut:

1. “Pelayanan Usaha Peternakan Kolektif Berjamaah (Salekah)” oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) Kabupaten Kotawaringin Barat dan
2. “Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): 30 PK (Paard Kracht), Mesin Penghancur Limbah Sabut Kelapa Menjadi ” oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. PELAYANAN USAHA PETERNAKAN KOLEKTIF BERJAMAAH (SALEKAH)

A. Latar Belakang

Pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan aspek penting dalam kerangka kerja Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelayanan tersebut merupakan representasi dan manivestasi Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang secara operasional telah digariskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan.

B. Ideation (Gagasan Utama)

Pendekatan pengembangan peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan dalam bentuk usaha kolektif berjamaah yang kemudian dimaknai sebagai wujud korporasi peternak berikut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola komponen utama sumber daya peternakan (peternak, ternak, dan sumber daya alam) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peternakan di daerah maupun nasional. Pentingnya pendekatan konsepsi ini kian terasa dalam mengembangkan kerangka kerja pelayanan publik di tengah bencana non alam Covid-19 yang memerlukan cara baru dan pendekatan baru dalam menjalankan berbagai aspek pelayanan publik.

Pengembangan komponen utama tersebut difokuskan dalam kawasan tertentu melalui pembangunan infrastruktur bagi semua pelaku usaha dan pembangunan fasilitas bersama bagi usaha kolektif berjamaah disertai pembentukan jejaring Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). SPR telah dirintis sejak tahun 2017 dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan, diatur tata hubungan dan kemitraan antara pelaku usaha/bisnis dan industri peternakan termasuk untuk komoditas sapi potong sebagai sebuah bisnis peternakan.

C. Strategi Pengembangan

Uji coba inovasi daerah dalam mewujudkan usaha kolektif berjamaah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan wilayah kecamatan yang menjadi lokasi laboratorium uji coba, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada. Uji coba tersebut sejalan dengan kajian akademis yang merekomendasikan pengembangan SPR yang cocok dengan kondisi usaha peternakan di Kalimantan Tengah, yang sangat berbeda dengan kondisi usaha peternakan rakyat di wilayah padat ternak di Pulau Jawa. Kajian akademis tentang pendekatan kelembagaan pengembangan usaha kolektif berjamaah tersebut guna terjamin implementasinya dalam rangka praktek pemerintah daerah dalam pengembangan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum pentahapannya sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan konsep, aturan, dan kelembagaan jejaring.
 - a. Mengenali data dan fakta tentang berbagai aspek peternakan yang dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Lada. Tahap penjarangan ini dilakukan melalui proses rembung tingkat desa yang selanjutnya mengerucut kepada pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan dan
 - b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kajian konsep pengembangan kawasan dan penyusunan naskah akademis Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan guna mengakselerasi prosesnya dan menyediakan kerangka konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
 - c. Mengidentifikasi Kawasan Peternakan potensial dengan pendekatan SPR dan Kawasan Perdesaan,
 - d. Menetapkan Kawasan Peternakan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
 - e. Menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan yang paling potensial secara partisipatif.
2. Tahap pengukuhan kelembagaan dan perangkat regulasi.
 - a. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019, tanggal: 25 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan, dan

- b. Penetapan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 800.9/1126/PKH.4 Tahun 2019, tanggal: 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tahapan ini merupakan momentum deklarasi akan manifestasi kelembagaan manajemen kawasan berikut perangkat suprastrukturnya. Hal ini guna memastikan agar usaha kolektif berjamaah berjalan baik sebagai mitra kerja Dinas PKH.

3. Tahap Implementasi sebagai tahap yang berjalan dinamis dengan tahap tahap sebelumnya.

Implementasi inovasi daerah usaha kolektif berjamaah dapat ditemukenali dari beberapa aspek:

- a. Perencanaan, anggaran, dan indikator kinerjanya,
- b. Praktek penyelenggaraan pelayanan publik, dan
- c. Penyelenggaraan event (dalam hal untuk menunjukkan dan menandai aspek tertentu dari inovasi) melalui Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat maupun mitra kerja (perguruan tinggi dan pihak lainnya).

Konsep dan Desain Penyelenggaraan Peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rancangan Inovasi Daerah yang tertuang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan yang memuat tentang pengelolaan sumber daya peternakan yang terdiri dari ternak, peternak, dan sumber daya alam (SDA) yang dikelola di kawasan melalui penyediaan infrastruktur untuk semua pelaku usaha dan penyediaan fasilitas bersama oleh pemerintah untuk usaha kolektif berjamaah di kawasan yang telah direncanakan.
- b. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) peternak dan kelembagaan peternak menjadi sebuah jejaring usaha kolektif berjamaah untuk semua komoditas peternakan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengelola SDM peternak dan kelembagaannya dengan mengacu kepada Hasil Studi Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Kegiatan Studi Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kajian oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSP3 LPPM) IPB merupakan kajian dengan pendekatan perspektif kawasan. Pendekatan pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan landasan pemikiran (theoretical framework) yang dikonstruksikan melalui sinergitas pendekatan “Sentra Usaha Kolektif Peternakan Rakyat (SUKPR)” dan “Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)”. SUKPR dengan SPR-nya berfokus pada “transformasi sosial dan teknologi”, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan berfokus “pengembangan wilayah dan kelembagaan ekonomi dan bisnis” pada suatu kawasan peternakan (aras mikro) dan outcome-nya meningkatkan taraf hidup peternak dan masyarakat perdesaan serta pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Peternakan.

2. Sasaran

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan mengelola aspek utama (peternak, ternak, dan sumber daya alam) melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas bersama di kawasan pengembangan peternakan,
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan, penganggaran, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Peternakan Rakyat (SLPR),
- c. Peningkatan daya saing daerah melalui penyelenggaraan peternakan,
- d. Teridentifikasinya kawasan peternakan potensial dengan pendekatan SUKPR dan kawasan perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat,
- e. Ditetapkannya kawasan peternakan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
- f. Tersusunnya Rencana Pembangunan Kawasan Peternakan pada kawasan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Manfaat/Dampak Inovasi

1. Peternak selaku pemilik usaha kolektif berjamaah:

- a. Kemudahan mendapat pelayanan sesuai bidang teknis,
- b. Kemudahan akses informasi dan pemenuhan sarana produksi dan pemasaran produk,
- c. Keuntungan finansial dari usaha kolektif yang dijalankan, dan
- d. Posisi tawar peternak sebagai individu pemilik usaha kolektif terhadap pihak lainnya.

2. Perusahaan Perorangan:

- a. Kejelasan posisi, fungsi, tugas, dan kewajiban serta peran dalam menjalankan usaha peternakan di kabupaten Kotawaringin barat (kepastian usaha) dan
- b. Memiliki mitra kerja yang sepadan dalam berusaha/interaksi usaha.

3. Pemerintah Daerah:

- a. Efektivitas perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan terhadap OPD,
- b. Operasional pelayanan sesuai bidang teknis,
- c. Kualitas pelayanan publik, dan
- d. Menghemat belanja daerah.

F. Implementasi (Uji Coba Rancangan)

1. Implementasi tahun 2018 dan tahun 2019.

- a. Pelaksanaan konsep Penyelenggaraan Peternakan dengan pendekatan usaha kolektif berjamaah, meliputi hal-hal berikut:

- 1) Penyusunan perangkat aturan pelaksanaan yang menggambarkan arah kebijakan teknis Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - 2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang terkait aktivitas di kawasan SPR pada masing masing bidang yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat di kawasan SPR melalui anggaran program dan kegiatan selama tahun 2018 dan tahun 2019, dan
 - 3) Dokumentasi visual (gambar dan film) yang merekam secara visual berbagai aktivitas di kawasan SPR yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka implementasi bisnis kolektif berjamaah.
- b. Fokus dokumentasi diarahkan ke lokasi laboratorium Uji coba konsep, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada.
 - c. SPR Berkat Bersama merupakan model usaha kolektif berjamaah yang berada di wilayah Uji coba yang meliputi 11 (sebelas) desa di Kecamatan Pangkalan Lada dan memiliki kepengurusan dalam bentuk Dewan Perwakilan Pemilik Ternak (DPPT) di masing-masing desa dan sudah dideklarasikan pembentukan oleh Bupati Kotawaringin Barat dan sedang menjalankan bisnis kolektif berjamaah di kawasan wilayah Kecamatan Pangkalan Lada.
2. Implementasi tahun 2020 dan rencana ke depan dalam rangka pengembangan inovasi.
 - a. Merupakan rencana implementasi konsep Penyelenggaraan Peternakan dengan pendekatan Usaha kolektif berjamaah selama tahun 2020 dan jangka waktu ke depan yang meliputi:
 - 1) Penyusunan perangkat aturan pelaksanaan yang akan digariskan sebagai arah kebijakan teknis Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat dan
 - 2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang terkait aktivitas di kawasan SPR pada masing masing bidang yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat di kawasan SPR melalui anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dan ke depan sesuai pemetaan program dan kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019.
 - b. Fokus implementasi selama tahun 2020 diarahkan ke lokasi laboratorium Uji coba konsep, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

G. Proses Pelaksanaan Inovasi

Bencana non alam Pandemi Covid-19 berdampak pada multi aspek dan sektor, termasuk pada sektor pertanian dalam arti luas. Kondisi ini berdampak pula pada usaha dan pelayanan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Beberapa poin pengaturan inovasi ke arah dimaksud dapat direpresentasikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan rantai pasok, khususnya pada bisnis ternak diarahkan antara lain dengan memangkas rantai tata niaga guna memberikan margin tata niaga kepada usaha kolektif

berjamaah yang sebelumnya merupakan domain tengkulak. Era tatanan normal baru akan membatasi gerak bakul ternak di lapangan karena faktor resiko penularan. Di sisi lain, pengawasan yang makin ketat dalam rangka lalu lintas ternak menyebabkan hambatan tersendiri untuk memasukan ternak dari luar daerah. Bisnis ternak dalam konsep usaha kolektif berjamaah prinsipnya adalah menghindari pasar fisik dan bisnis berjalan melalui jejaring SPR dengan kolaborasi peternak, manajer SPR, dan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan tersebut tercermin dari kegiatan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari raya keagamaan di saat pandemi Covid-19 (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa dijalankan dengan protokol kesehatan dengan memberdayakan SPR dan memberi manfaat kepada peternak,

2. Deklarasi SPR pada tahun 2020 yang sebelumnya dirancang dengan kerumunan peternak dan stakeholder lainnya sekitar 100 (seratus) orang melalui teknologi akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan terbukti masih akan dilaksanakan setelah refocusing terakhir,
3. Pelayanan teknis OPD melalui berbagai bidang tetap bisa dijalankan dengan efektif dan efisien dengan melibatkan kelembagaan SPR di kawasan di tengah keterbatasan anggaran Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
4. Rancangan aplikasi register peternak ke depan akan membenangmerahi aktivitas Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelenggarakan pelayanan dan regulasinya.

II. INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG): MESIN CHOPPER 30 PK (PAARD KRACHT), MESIN PENGHANCUR LIMBAH SABUT KELAPA MENJADI COCOPEAT

A. Latar Belakang

Desa Pangkalan Durin berada di Kecamatan Pangkalan Lada. Jarak antara Desa Pangkalan Durin dengan Ibukota Kecamatan (Desa Pandu Senjaya) adalah 15,2 km dan jarak antara Desa Pangkalan Durin dengan Ibukota Kabupaten (Pangkalan Bun) adalah 26,1 km. Desa Pangkalan Durin merupakan salah satu desa penghasil buah kelapa. Sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha tani kelapa. Hal ini dipertegas dengan adanya proses pengolahan buah kelapa yang konvensional dan masih dilakukan hingga saat ini.

Pengolahan buah kelapa yang konvensional menyisakan sabut kelapa yang menumpuk. Sabut kelapa adalah bahan berserat yang ditemukan di antara kulit bagian dalam yang keras dan lapisan luar kelapa. Terkadang sabut kelapa digunakan sebagai pengganti kayu bakar, yaitu sebagai media pengasapan. Namun, sabut dari kelapa muda akan dibuang dan menjadi onggokan sampah hingga membusuk atau kering. Jika onggokan sabut kelapa ini bertambah banyak, maka dapat menjadi limbah. Limbah sabut kelapa yang tidak dikelola secara benar, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran bagi lingkungan.

B. Ideation (Gagasan Utama)

Limbah sabut kelapa dapat diolah menjadi barang atau benda yang dapat dijual sehingga akan memberikan nilai ekonomis atau peluang usaha sampingan. Seiring

perkembangan teknologi dan gaya hidup, pemanfaatan sabut kelapa semakin bervariasi. Limbah sabut kelapa dapat diolah menjadi sapu ijuk, keset serabut kelapa, tali, Cocomesh (Jaring sabut kelapa), Coco Coir (media tanam yang berasal dari sabut kelapa), dan Cocopeat.

Cocopeat memiliki bentuk dan tekstur halus, menyerupai serbuk kayu, dan digunakan sebagai media tanam karena bersifat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta dapat menetralkan keasaman tanah. Cocopeat berguna untuk budidaya tanaman lewat pembuatan pupuk organik. Sifat fisika-kimia pada Cocopeat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta dapat menetralkan keasaman tanah menjadikan hasil samping. Cocopeat digunakan sebagai media pertumbuhan tanaman hortikultur, tanaman rumah kaca, atau dijadikan pot untuk tanaman hias.

Langkah yang diambil oleh masyarakat Desa Pangkalan Durin dalam pengurangan limbah sabut kelapa, yaitu melakukan daur ulang sabut kelapa menjadi Cocopeat sehingga dapat digunakan sebagai pupuk media tanam bagi masyarakat lokal untuk tanaman palawija, kelapa sawit, dan cabai. Melihat potensi tersebut, Inovator Desa Pangkalan Durin merasa perlu adanya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk memudahkan, mempercepat, dan memperbanyak produksi Cocopeat sehingga tercipta industri rumah tangga yang berbasis teknologi dan ramah terhadap lingkungan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

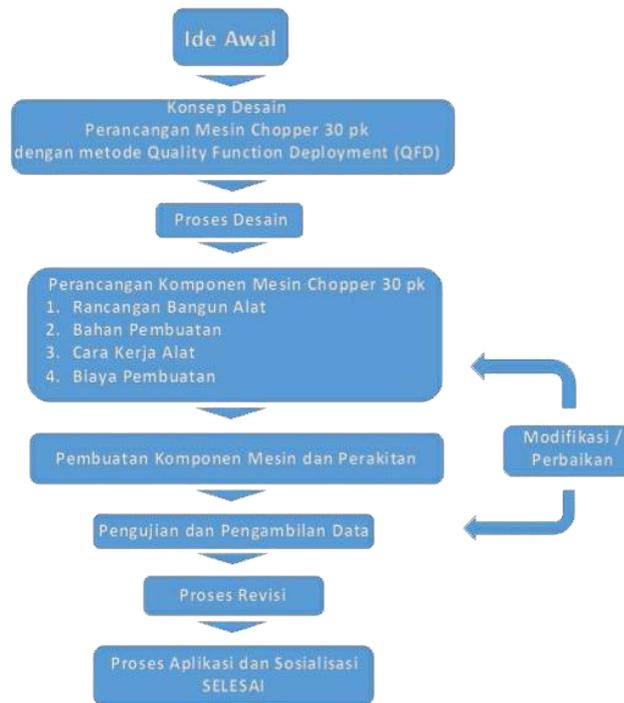
C. Strategi Pengembangan

Pada tanggal 09 April 2017, Inovator Desa Pangkalan Durin bersama pemuda Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) di Desa Pangkalan Durin, didukung Pemerintah Desa Pangkalan Durin, dan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat mengembangkan suatu mesin yang disebut Chopper 30 PK melalui penerapan TTG. Berikut strategi pengembangan Mesin Chopper 30 PK :

1. Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK

Mesin Chopper 30 PK dirangkai sedemikian rupa dan sesederhana mungkin sehingga masyarakat mudah membuat, menggunakan, dan merawatnya, serta mempunyai ciri khas tentu sangat berbeda dengan mesin pabrikan yang lainnya. Mesin ini dibuat untuk memisahkan sabut dari kelapanya dengan cara memutar as roll yang sudah terhubung dengan pulley yang digerakan oleh motor listrik dan transfer oleh V-belt. Pada gambar 1, dijelaskan proses Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK.

Gambar 4.1
Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK



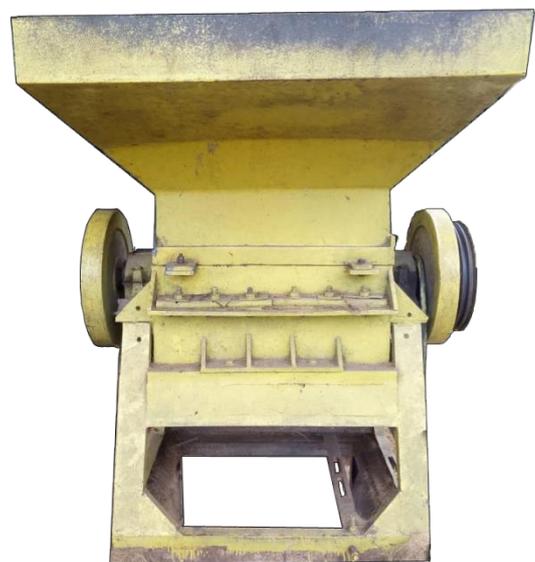
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Mesin Chopper 30 PK

Biaya pembuatan mesin dapat ditekan sekecil mungkin karena banyak menggunakan barang bekas layak pakai yang ada di sekitar Desa Pangkalan Durin. Dari hasil di bawah ini (Tabel 1), diketahui biaya yang dihabiskan adalah Rp. 11.735.000,-. Biaya termahal adalah pembelian Mesin Dompeng 30 PK karena harus membeli mesin baru.

Gambar 4.2
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Muka)



Gambar 4.3
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Belakang)



Gambar 4.4
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Samping)



Tabel 4.9
Biaya Pembuatan Mesin Chopper 30 PK

No.	Spesifikasi	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Besi Plat 10 mm	2 lembar	300.000,-	600.000,-
2	Besi Kanal U 10 X 5	1 Lembar	200.000,-	200.000,-
3	Besi Kanal U 7 X 5	2 batang	150.000,-	300.000,-
4	Besi Kanal L 7 X 5	1 buah	110.000,-	110.000,-
5	Besi As 7 cm	1 batang	150.000,-	150.000,-
6	Bearing Duduk	1 buah	200.000,-	200.000,-
7	Pisau dari Per Mobil	3 buah	170.000,-	510.000,-
8	Roda Gila	2 buah	150.000,-	300.000,-
9	Pulley 30 cm	2 buah	110.000,-	220.000,-
10	Tali Panbel	1 buah	50.000,-	50.000,-
11	Cat Warna	1 Kg	60.000,-	60.000,-
12	Minyak Cat	1 Liter	35.000,-	35.000,-
13	Mesin Dompok 30 PK	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
14	Pengelasan dan Perakitan	1 Unit	4.000.000,-	4.000.000,-
Total (Rp.)				11.735.000,-

3. Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK

Tabel 4.10
Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Type	Horizontal Chopper
2	Kapasitas	200 – 300 Kg/Jam (Continuous)
3	Rangka	Besi
4	Body	Plat Mill Stel
5	Jumlah Pisau	8 (Delapan) Pieces
6	Transmisi	Pulley, V-Belt
7	Penggerak	Mesin Dompok 30 PK (Power Kuda)
8	Dimensi	130 x 90 cm x 85 cm

4. Biaya Produksi Pengolahan Cocopeat Melalui Mesin Chopper 30 PK

Tabel 4.11
Biaya Produksi Mesin Chopper 30 PK di dalam pengolahan Cocopeat

Item	Unit	Rp. / unit	Biaya (Rp.)
Fiber Buah Kelapa	210 Kg	100	21.000,-
Solar	1 Liter	10.000	10.000,-
Karung Plastik	1 Lembar/50 Kg	500	500,-
Upah Kerja	Orang	1 Jam	50.000,-
Total (Rp.)			81.500,-

Dengan demikian, diketahui bahwa biaya produksi untuk sabut kelapa sebanyak 210 kg adalah sebesar Rp. 81.500,-. Estimasi Cocopeat jika dijual adalah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- per 20 kg. Estimasi harga Cocopeat ini didasarkan pada bahan baku siap pakai oleh home industry atau skala industri.

Gambar 4.5
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Atas)



D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembuatan mesin Chopper 30 PK ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pencacahan serbuk, tidak hanya dari bahan sabut kelapa tetapi dapat berupa benda berbahan plastik.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Cocopeat dan mesin Chopper 30 PK.
3. Dari aspek teknologi, konstruksi mesin Chopper 30 PK menggunakan pendekatan ergonomi partisipatori, sehingga pengolahan serat sabut kelapa relatif sederhana yang dapat dilaksanakan oleh usaha-usaha kecil.

Sasaran pembuatan mesin Chopper 30 PK adalah masyarakat Desa Pangkalan Durin dapat mengolah sabut kelapa menjadi nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat diolah oleh pengusaha kecil (lokal).

E. Manfaat/Dampak Inovasi

Pembuatan media tanam dengan menggunakan mesin memiliki keunggulan diantaranya adalah lebih ramah lingkungan dan proses pengerjaan lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan mesin Chopper 30 PK dapat meningkatkan produktivitas sabut kelapa sebesar 50% dari proses produksi dengan cara tradisional. Selain itu, dapat meminimalisir waktu pengerjaan, dari 2 (dua) hari menjadi 1 (satu) hari. Putaran as roll yang maksimal adalah yang menggunakan putaran 400 rpm, maka akan menghasilkan serat kelapa 82% dan Cocopeat 28% serta panjang serat 34 cm.

Cocopeat yang berasal dari sabut kelapa berkontribusi sebesar 42% dalam pengurangan limbah sabut kelapa. Fungsi dari Cocopeat ini tidak hanya bagus untuk media tanamnya saja, tetapi juga bagus untuk perkembangan tanaman.

Berikut manfaat Cocopeat bagi tanaman:

1. Aman bagi lingkungan karena terbuat dari bahan alami.
2. Memiliki tekstur yang memudahkan pertukaran oksigen di dalam tanah sehingga dapat menyuburkan tanaman.
3. Dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang awet dan dapat digunakan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya.
4. Berfungsi sebagai anti bakteri dan anti jamur karena mengandung sejenis jamur fungi yang sangat menguntungkan bagi tanaman.
5. Dalam batas tertentu bisa digunakan untuk makanan ternak dan itik.

Mesin Chopper 30 PK merupakan produk multifungsi yang dihasilkan dari pengolahan bahan sederhana yang ada di sekitarnya sehingga lebih aman digunakan dengan pengolahan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah di bandingkan produk industri.

F. Implementasi (Uji Coba Rancangan)

Target utama penjualan olahan Cocopeat melalui mesin Chopper 30 PK adalah perusahaan dalam dan luar Kalimantan Tengah, agar bisa mengganti pupuk dari berbahan kimia menjadi Cocopeat, terutama perusahaan kelapa sawit dan bubuk kertas dari akasia.

Melalui beberapa kali renovasi, diharapkan hasil dan ketahanan mesin menjadi lebih maksimal.

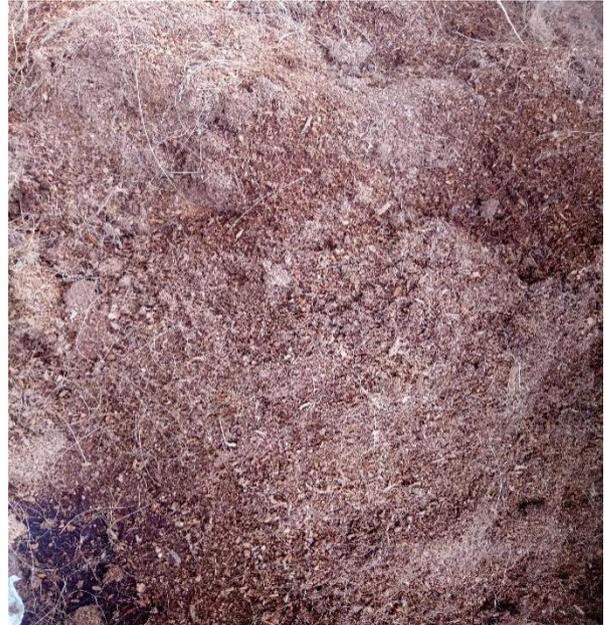
G. Proses Pelaksanaan Inovasi

Proses pengolahan serat sabut kelapa menjadi produk samping atau turunan berupa Cocopeat tidaklah terlalu sulit, yakni memproses sabut kelapa menjadi serbuk halus dengan cara digiling menggunakan mesin. Kemudian sabut yang sudah halus (sudah menjadi serbuk) dicuci terlebih dahulu sebelum dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi kering atau Cocopeat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar garam dalam sabut.

Gambar 4.6 Cocofiber



Gambar 4.7 Cocopeat



Untuk pemasaran produk saat ini sudah dipasarkan hingga ke kabupaten tetangga yaitu Lamandau dan Sukamara, dipasarkan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat, instansi daerah dan masyarakat secara umum. Berikut adalah contoh produk yang dipasarkan.

Gambar 4.8

Contoh produk dari hasil turunan pot bunga





**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 38 (tiga puluh delapan) urusan yang terdiri atas:

1. **6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. **18 (Delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**, meliputi urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan
3. **6 (Enam) Urusan Pilihan**, yaitu Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
4. **9 (Sembilan) Unsur Penunjang**, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan; Pengawasan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan dan Kewilayahan, serta:
5. **1 (Satu) Unsur Pemerintahan Umum**, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.1 Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

Urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab, dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan 181 program dan 520 kegiatan. Rekapitulasi Rencana Anggaran pada Perangkat Daerah (PD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD
Pada Perubahan RKPd Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Kode	Bidang	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan	RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan	RKPd Murni	APBD Murni	RKPd Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	4	4	14	15	15	306,909,375,000.00	313,668,760,369.00	312,364,380,122.00	0	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	5	5	20	21	21	170,700,767,000.00	141,984,201,764.00	157,012,966,198.00	0	1	Dinas Kesehatan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	6	6	6	19	19	20	184,011,501,000.00	252,276,548,536.00	294,387,840,779.00	0	1	RSUD Sultan Imanudin
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	11	11	23	23	23	182,284,559,000.00	227,864,113,200.00	225,301,166,584.00	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	5	5	13	13	15	10,468,256,100.00	9,771,692,550.00	10,156,245,265.00	0	2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	5	5	15	15	15	14,052,740,000.00	13,312,774,600.00	13,034,856,401.00	0	0	Satpol PP-Pemadam Kebakaran
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	4	5	17	18	20	8,134,276,000.00	7,559,306,300.00	13,712,340,674.00	1	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	7	7	16	16	16	8,149,856,000.00	7,337,299,200.00	6,335,723,038.00	0	0	Dinas Sosial

Kode	Bidang	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	4	4	13	13	13	7,316,245,080.00	6,970,496,700.00	6,783,612,041.00	0	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	5	5	12	12	12	5,236,414,800.00	5,135,388,971.00	5,395,619,740.00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	5	5	13	13	13	4,997,209,000.00	5,211,978,600.00	4,757,900,901.00	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	3	3	3	3	3	3	146,246,900.00	117,936,350.00	52,465,000.00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6	7	9	12	14	16	17,436,255,000.00	22,328,753,000.00	25,263,882,281.00	3	4	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	5	13	13	13	7,241,007,000.00	7,004,209,200.00	6,262,702,095.00	0	0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4	4	4	9	10	10	7,644,305,000.00	8,262,323,200.00	6,665,629,256.00	0	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	3	3	8	8	8	3,362,034,200.00	3,085,465,029.00	3,088,384,638.00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	3	3	12	14	15	16,385,891,000.00	17,650,411,000.00	15,675,030,804.00	0	3	Dinas Perhubungan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	3	3	8	11	11	9,314,043,600.00	9,171,452,500.00	8,893,357,905.00	0	3	Dinas Kominfo, Persandian Dan Statistik
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	6	6	6	13	14	15	9,603,648,700.00	8,815,545,610.00	7,787,365,642.00	0	2	Disperindagkop, UKM
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	6	13	13	13	6,114,114,000.00	5,857,349,100.00	5,113,686,488.00	0	0	Dinas Penanaman Modal-PTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	4	4	14	14	14	7,467,934,000.00	9,028,776,000.00	6,925,906,433.00	0	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	1	1	1	31,887,400.00	32,150,000.00	16,500,000.00	0	0	Dinas Kominfo, Persandian Dan Statistik
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	1	1	1	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	Dinas Kominfo, Persandian Dan Statistik
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2	2	2	3	3	3	2,668,034,000.00	3,023,618,431.00	2,696,895,391.00	0	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Bidang	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	3	3	8	9	9	5,478,735,100.00	5,383,682,635.00	5,280,603,889.00	0	1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	2	2	4	4	4	116,548,900.00	116,739,365.00	72,876,917.00	0	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4	4	4	14	14	14	13,809,356,000.00	13,613,437,300.00	13,912,486,946.00	0	0	Dinas Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5	5	5	12	13	13	7,210,575,000.00	6,443,911,800.00	5,774,304,207.00	0	1	Dinas Pariwisata
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	5	5	14	14	14	23,198,200,000.00	22,096,089,200.00	18,460,404,965.00	0	0	Dinas TPHP
		7	7	7	21	21	21	11,000,642,000.00	10,271,482,300.00	10,240,890,751.00	0	0	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	6	6	8	8	8	4,313,658,300.00	4,026,245,249.00	3,597,924,251.00	0	0	Disperindagkop, UKM
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	3	3	3	3	1,534,572,000.00	981,068,941.00	354,735,000.00	0	0	Disperindagkop, UKM
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	3	3	3	3	3	3	311,954,920.00	352,617,600.00	352,617,600.00	0	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01	Sekretariat Daerah	3	3	3	19	19	19	46,891,534,000.00	50,547,622,100.00	44,981,278,958.00	0	0	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD	2	2	2	14	14	14	26,064,332,000.00	27,241,219,000.00	27,497,532,058.00	0	0	Sekretariat DPRD
5.01	Perencanaan	3	3	3	15	15	15	8,785,902,000.00	8,087,460,700.00	7,274,997,333.00	0	0	BAPPEDA
5.02	Keuangan	3	3	3	14	14	14	195,185,360,000.00	181,972,500,700.00	178,701,137,221.00	0	0	BPKAD
		2	2	2	9	9	9	8,864,337,000.00	8,661,768,000.00	7,802,186,951.00	0	0	Bapenda

Kode	Bidang	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru/Berkurang	Jumlah Kegiatan Baru/Berkurang	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan	RKPD Murni	APBD Murni	RKPD Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.03	Kepegawaian	2	2	2	11	11	11	6,630,344,000.00	6,288,483,100.00	5,726,964,410.00	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	1	1	2	2	2	3,443,380,000.00	3,426,026,900.00	1,582,214,136.00	0	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	1	1	3	3	3	774,992,000.00	747,412,600.00	708,132,600.00	0	0	BAPPEDA
6.01	Inspektorat Daerah	3	3	3	11	11	11	10,606,026,000.00	11,173,838,000.00	9,939,749,783.00	0	0	Inspektorat
7.01	Kecamatan	6	6	6	14	14	16	43,131,818,000.00	36,694,018,400.00	35,955,212,835.00	0	2	Kecamatan
8.01	Pemerintahan Umum	5	5	5	10	11	11	6,059,107,000.00	6,218,771,000.00	5,968,335,141.00	0	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		177	178	181	494	509	520	1,413,117,974,000.00	1,489,844,945,100.00	1,521,899,043,628.00	4	26	



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi perubahan RKPD ini, merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada Triwulan II Tahun 2021.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah agar :

1. Berkomitmen untuk memanfaatkan system perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah.
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horisontal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, S. H., M. H.